Ir. Dedi Nugraha S. Setiono MURP menamatkan pendidikan sarjana Teknik Sipil di ITB (1985), bekerja di perusahaan konsultan menangani kegiatan pembangunan infrastruktur transmigrasi dan irigasi. Sempat bekerja setahun di perusahaan kontraktor merangani pembangunan konstruksi museum dan bendera Sukarno-Hatta (1987-88), kemudian kembali ke dunia konsultansi dan sejak tahun 1990 memfokuskan diri kepada isu-isu pembangunan kewilayahan. Pengalamannya di Yayasan Mandiri, Pelangi Indonesia, dan Wanadri banyak mengilhami dirinya saat menangani proyek konsultansi pengembangan wilayah yang berbasis pengembangan masyarakat lokal di berbagai provinsi di Indonesia (1997-2003).

Ketertarikannya kepada ilmu kewilayahan dipicu oleh rasa kagum kepada alm. Ir. Sutami, mantan menteri Pekerjaan Umum yang juga seorang insinyur teknik sipil alumni ITB namun berkomitmen tinggi terhadap ilmu kewilayahan. Dalam kaitan dengan ilmu ekonomi kewilayahan, penerapan *modeling* menjadi salah satu aspek favorit bagi Dedi Nugraha S. Setiono, selain pendekatan-pendekatan pembangunan yang akrab lingkungan dan yang berpihak ke pada masyarakat.

Seusai menamatkan pendidikan *post-graduate* di jurusan *Urban and Regional Planning – the University of Sydney* (1994), Dedi Nugraha S. Setiono bergabung sebagai tenaga pengajar di Jurusan Teknik Planologi Institut Teknologi Indonesia.

Buku ini merupakan kompilasi dari eksplorasi literatur akademis yang dikombinasikan dengan pengalaman kerja belasan tahun sebagai konsultan lepas di berbagai proyek pembangunan dan studi pengembangan wilayah.

Isi buku ini sangat berguna bagi aparat perencana di pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/ kota untuk menambah pengetahuan dasar mereka dalam rangka merencanakan program pembangunan di wilayahnya. Juga bermanfaat bagi konsultan, analis, serta pengamat yang berminat dan banyak berhubungan dengan kegiatan perencanaan pembangunan wilayah..

(Prof. Suahasil Nazara, Ph.D., Ketua Departemen Ilmu Ekonomi FEUI)

Pendekatan kewilayahan dalam buku ini dapat memperkaya analisis pembangunan di Indonesia yang kondisi geografisnya berbasis kepulauan. Contoh-contoh analisis praktis dalam buku ini sangat membantu proses pemahaman isu pengembangan wilayah..

(Dr. Suprayoga Hadi, Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, BAPPENAS)

LEMBAGA PENERBIT
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA

Dedi NS. Setiono

EKONOMI PENGEMBANGAN WILAYAH
TEORI dan ANALISIS

Dedi NS. Setiono

EKONOMI PENGEMBANGAN WILAYAH

TEORI dan ANALISIS

LEMBAGA PENERBIT
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA

EKONOMI PENGEMBANGAN WILAYAH
(Teori dan Analisis)

Dedi NS. Setiono

LEMBAGA PENERBIT
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA
2011

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

EKONOMI PENGEMBANGAN WILAYAH
(Teori dan Analisis)

Oleh: Dedi NS. Setiono
Editor: Pribadi Setiyanto
Desain sampul: Sujono D.
Tata letak: Sudarto

Cetakan I, Juli 2011
Diterbitkan oleh:
Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Jl. Salemba Raya 4, Jakarta 10430
Telp.: (021) 31930252, Fax.: (021) 3106472

Perpustakaan Nasional :
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Dedi NS. Setiono
EKONOMI PENGEMBANGAN WILAYAH – Teori dan Analisis / Dedi NS. Setiono; Editor: Pribadi Setiyanto – Jakarta:
Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2011

xxi ; 358 hlm.; 24 cm

ISBN: 979-3452-96-9

Hak Cipta © 2011 pada Penulis dan Penerbit dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT., penyusunan buku yang cukup banyak memakan waktu ini akhirnya dapat terselesaikan dan dapat disampaikan ke hadapan pembaca. Buku ini disusun dengan maksud untuk memberikan pengetahuan dasar tentang ilmu ekonomi kewilayahan, baik secara teoritis maupun praktis. Melalui buku ini penulis berharap peranan ilmu ekonomi kewilayahan menjadi semakin dikenal masyarakat dan bermanfaat bagi proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah.

Pada awalnya penulis sekedar ingin menulis buku yang berisikan teknik atau metoda analisis praktis untuk membantu para mahasiswa berlatih mengerjakan soal-soal analisis ekonomi kewilayahan. Namun, proses penulisan buku ini ternyata berlangsung cukup panjang dan penuh dinamika sehingga isinya berkembang mengikuti proses dialektika dinamis yang terjadi. Hal ini dapat dilihat dari contoh-contoh aplikasi yang disajikan. Rentang waktu data yang digunakan bervariasi dari pertengahan tahun 1990an hingga sekitar tahun 2006/2007.

Secara garis besar isi buku ini terdiri atas 5 bagian, yakni: pendahuluan, teori lokasi, perspektif analisis, perangkat analisis, dan penutup. Dengan mengikuti sistematika tersebut diharapkan pembaca dapat mendapatkan gambaran yang cukup utuh mengenai ilmu ekonomi kewilayahan mulai dari teori dan konsep dasar analisis, perspektif analisis yang diterapkan, hingga alat-alat analisis yang digunakan. Beberapa contoh penerapan perhitungan disajikan untuk membantu pembaca memahami model analisis yang dibahas. Bagi para mahasiswa, beberapa soal khusus juga ada diberikan sebagai bahan untuk latihan.

Penyusunan buku ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan berbagai pihak. Di rumah, dukungan dari yang tercinta Titik Astuty dan Paramitha Putri Indraswari selalu menjadi motivator pemelihara semangat. Penulis juga berterima kasih kepada saudara Hendriko 'Parto' yang banyak membantu memberi bahan masukan pada awal

proses penulisan buku ini; juga terima kasih kepada Isnandar Zakir yang banyak membantu proses penulisan dan Dr. Eddy Soeratman Setiono yang mendukung ide penerbitan. Dan kepada semua pihak yang telah membantu proses penulisan buku ini baik langsung maupun tak langsung, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Semoga amal kebaikan Saudara sekalian mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Akhir kata, penulis sadar buku ini masih banyak memiliki kelemahan. Untuk itu jika pembaca menemukan kekurangan dan kesalahan, penulis mohon maaf karena semua itu merupakan kekurangan penulis. Bila pembaca mendapatkan hal-hal yang baik dari buku ini, semua itu semata-mata milik Allah SWT. Semoga buku dapat bermanfaat....

BSD, April 2010

DNSS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v

BAGIAN PERTAMA :
PENDAHULUAN DAN PENGERTIAN DASAR

Bab 1 Pendahuluan 3
- 1.1. Prolog 3
- 1.2. Ilmu Kewilayahan 6
- 1.3. Fondasi Pokok, Pertanyaan Kunci dan Lingkup Studi Ekonomi Kewilayahan 8
- 1.4. Sistematika Isi Buku 12

Bab 2 Pengertian Dasar Kewilayahan 23
- 2.1. Ilmu Kewilayahan yang Multi-disiplin 23
- 2.2. Pengertian dan Cakupan Wilayah 25
- 2.3. Ekonomi Kewilayahan 29
- 2.4. Tiga Pondasi Ekonomi Kewilayahan menurut Hoover & Giarratani 31
- 2.5. Konsepsi dan Permodelan 36
- 2.6. Perekonomian Kewilayahan versus Perekonomian Nasional 41

BAGIAN KEDUA :
TEORI LOKASI

Bab 3 Teori Lokasi Klasik 51
- 3.1. Teori Sewa Lahan dan Penggunaan Lahan 53
  - 3.1.1. Model Lokasi Kegiatan Pertanian von Thunen.... 53
  - 3.1.2. Model Alonso dan Tata Guna Lahan di Perkotaan 59
  - 3.1.3. Gradien Kepadatan Penduduk Perkotaan 64

3.2. Teori Lokasi Industri - Pendekatan Biaya Lokasi Terkecil (Weber) 67
3.2.1. Teori Lokasi Industri Alfred Weber 67
3.2.2. Analisis Lokasi Industri Individual berdasarkan Lokasi Sumber Bahan Baku 78

Lampiran 3.1.
Contoh Analisis Kuantitatif Optimasi Lahan Model Cincin von Thunen 85

Lampiran 3.2.
Contoh Analisis Lokasi Industri Berorientasi Bahan Baku.. 88

Bab 4 Teori Tempat Sentral, Gravitasi, dan Konsep Penentuan Lokasi Industri 91
4.1. Teori Tempat Sentral (*Central Places*) – W. Christaller dan Losch 91
4.2. Pengembangan Aplikasi Teori Tempat Sentral dan Luasan Pasar (Market Area) 102
4.2.1. Contoh Aplikasi Penentuan Hirarki Pusat Kegiatan 103
4.2.2. Konsep Pendekatan Luasan Pasar (Market Area) 116
4.3. Model Kompetisi Spasial – Hotelling 120
4.4. Model Pendekatan Gravitasi 122
4.4.1. Interaksi antar Lokasi 123
4.4.2. Hukum Gravitasi Retail dari Reilly 130
4.4.3. Indeks Potensial Akses ke Pasar (IPAP) 132
4.5. Beberapa Pendekatan Lain Dalam Penentuan Lokasi 134
4.5.1. Model Pendekatan Lokasi Usaha – Smith 134
4.5.2. Model Kohesif dan Dispersif – Hoover 138
4.5.3. Faktor-faktor Lain Dalam Penentuan Lokasi Individual 139
4.6. Kecenderungan Konsentrasi Lokasi Usaha/ Industri... 142
4.7. Penutup 146

Lampiran 4.1.
Batas Area Perdagangan - Model Gravitasi Reilly 150

BAGIAN KETIGA :
PERSPEKTIF ANALISIS

Bab 5 Perspektif Analisis Pengembangan Wilayah 155
5.1. Struktur dan Kompesisi Ekonomi – Pendekatan Neo Klasik 160
5.1.1. Fungsi Produksi 160
5.1.2. Faktor Produksi Kapital 163
5.1.3. Faktor Produksi Tenaga Kerja 164
5.1.4. Faktor Produksi Teknologi 165
5.1.5. Faktor Produksi Bahan Baku dan Lahan 174
5.1.6. Input Antara dari Produksi Sektor Lain 174
5.1.7. Pendapatan atau Produk Domestik Regional Bruto 174
5.2. Efek Multiplier dan Ekonomi Basis 176
5.2.1. Pendekatan Ekonomi Basis 177
5.2.2. Analisis Input- Output 179
5.3. Kekuatan Internal Perekonomian Wilayah 183
5.3.1. Kegiatan Ekonomi Wilayah Sebagai Proses yang Berkelanjutan 184
5.3.2. Konsentrasi Lokasi Kegiatan Ekonomi: Prosea Agglomerasi dan Eksternalitas Ekonomi 190
5.3.3. Konvergensi Usaha vs Diversifikasi Usaha 193
5.3.4. Konsentrasi Lokasi vs Penyeberan Lokasi 204
5.4. Kewirausahaan dan Kutub Pertumbuhan 205
5.5. *Increasing Return* atau Skala Ekonomis 208
5.6. Keterkaitan Ekonomi Antar Wilayah 212

Lampiran 5.1.
Metode Total Produksi Faktor (*Total Factor Production*) Robert Solow-1957 221

Rab 6 Perspektif Daya Tarik Lokasi 225
6.1. Keunggulan Komparatif Sumberdaya Alamiah Lokal... 229
6.1.1. Sumberdaya Alam Sebagai Bahan Baku 230
6.1.2. Tenaga Kerja Murah 234
6.1.3. Ketersediaan Lahan 234

6.2. Faktor Aksesibilitas dan Prasarana Transpor 235
6.3. Sinergi Sistem Perencanaan Transportasi 242
6.3.1. Barang Publik vs Barang Swasta? 242
6.3.2. Sinergi Perencanaan Sistem Transportasi Darat, Sungai, Laut dan Udara 244
6.4. Energi Sebagai Salah Satu Kebutuhan Dasar 248
6.5. Iklim Usaha Kondusif dan Fasilitasi Pemerintah 252
6.5.1. Tingkat Korupsi 255
6.5.2. Jumlah Prosedur dan Lamanya Proses Administrasi Perijinan 256
6.5.3. Urutan KPPOD 260

Bab 7 Perspektif Analisis Lainnya: Perdesaan dan Perkotaan, Pengembangan Ekonomi Lokal, Kemiskinan dan Pemerataan, dan Daya Dukung Lingkungan 265
7.1. Perdesaan dan Perkotaan 265
7.1.1. Beberapa Pemikiran tentang Perdesaan 272
7.1.2. Perkembangan Karakter Perekonomian Perkotaan 276
7.2. Pengembangan Perekonomian Lokal 277
7.3. Kemiskinan dan Ketidakmerataan Pembangunan 280
7.3.1. Konsep Kemiskinan 280
7.3.2. Model-model Pengukuran Kemiskinan di Indonesia 280
7.3.3. *Millenium Development Goals* (MDGs) 287
7.3.4. Perlunya Data Kemiskinan yang Efektif, Reliabel, Absah dan Mutakhir 288
7.4. Ketidakmerataan pembangunan 290
7.4.1. Kesenjangan Ekonomi di Indonesia 291
7.4.2. Pengukuran Tingkat Ketidakmerataan 299
7.5. Daya Dukung Lingkungan dan Polusi 302

Lampiran 7.1.
Sasaran, Target dan Indikator Pencapaian *Millenium Development Goals* Indonesia 308

BAGIAN KEEMPAT :
PERANGKAT ANALISIS

Bab 8 Data dan Informasi untuk Bahan Analisis 313
8.1. Data dan Informasi Dasar 314
8.1.1. Kependudukan 315
8.1.2. Struktur Ketenagakerjaan 322
8.1.3. Struktur Produk Domestik Wilayah 327
8.2. Data dan Informasi Penunjang 339
8.2.1. Tabel Transaksi Perdagangan Antar Sektor (Intra Wilayah) 339
8.2.2. Transaksi Perdagangan Antar Wilayah 342
8.2.3. Tabel Asal dan Tujuan Pergerakan Barang dan Penumpang 343
8.2.4. Data Potensi Desa dan Susenas 350
8.2.5. Penutup 353

Lampiran 8.1
Contoh Data PDRB Provinsi Sulteng Tahun 2000 & 2006 (HK 2000) 356
Lampiran 8.2
Koefisien Gini 357

Bab 9 Model Ekonomi Basis 361
9.1. Penurunan Model Matematis 362
9.2. Kecenderungan Mengkonsumsi (*propensity to consume*) 367
9.3. Basis Multiplier – Prof. Tiebout 369
9.4. Contoh Penerapan Model Ekonomi Basis 373
9.5. Model *Multiplier* Tenaga Kerja dan Kependudukan 376
9.5.1. Model *Multiplier* Tenaga Kerja 376
9.5.2. Model *Multiplier* Kependudukan 378
9.6. Model Ekonomi Basis Banyak-Sektor 383

Lampiran 9.1.
Soal – Soal Untuk Latihan 391

Bab 10 Model Analisis Input-Output 395
10.1. Struktur Tabel Input-Output 397
10.1.1. Aliran Output dan Input 398
10.1.2. Kesetimbangan Input – Output 399
10.1.3. Komponen Pokok Tabel Transaksi Perdagangan 400
10.2. Perhitungan Analisis Input-Output 403
10.2.1. Perhitungan Matriks Koefisien Langsung Perdagangan [A] 406
10.2.2. Menghitung Matriks Leontief [I – A] 408
10.2.3. Menghitung Invers Matriks Leontief [I – A] 408
10.2.4. Pemeriksaan Hasil Perhitungan Invers Matriks Leontief [I – A] 410
10.3. Faktor atau Efek Pengali (Multiplier) 411
10.3.1. Faktor Pengali Output 411
10.3.2. Contoh Analisis Perhitungan Efek *Multiplier Output* 412
10.3.3. Efek *Multiplier* Pendapatan 420
10.3.4. Efek *Multiplier* Tenaga Kerja 422
10.3.5. Efek *Multiplier* Akibat Perubahan Rinci Komponen Permintaan Akhir 424
10.3.6. Contoh Perhitungan Praktis 424
10.4. Daya Penyebaran dan Daya Kepekaan 432
10.5. *Inter Regional* I/O dan *Multi Regional* I/O 436
10.5.1. Input-Output antar Wilayah 437
10.5.2. Input-Output Multi-Regional 443
10.6. Penutup 446
Lampiran -10.1
Contoh Penyelesaian Matriks I/O dengan Metode Matriks Manual 450
Lampiran 10.2
Soal – Soal Untuk Latihan 452

Bab 11 Perangkat Analisis Praktis 453
11.1. Teknik Asumsi 456
11.2. Analisis Persyaratan Minimum 459

11.3. *Location Quotient* 465
11.3.1. Model Analisis LQ 466
11.3.2. Beberapa Asumsi Sebagai Pendekatan Teoritis Model Analisis LQ 469
11.3.3. Contoh Penerapan Model Analisis LQ 470
11.3.4. Beberapa Catatan tentang Metode LQ 478
11.4. Analisis Koefisien Lokalisasi, Kurva Lokalisasi, Koefisien Spesialisasi dan Kurva Spesialisasi 479
11.4.1. Koefisien Lokalisasi 480
11.4.2. Kurva Lokalisasi 483
11.4.3. Koefisien Spesialisasi 486
11.4.4. Kurva Spesialisasi 489
11.4.5. Beberapa Indeks Konsentrasi Industri Lainnya 491
11.5. Analisis *Shift-Share* 491
11.5.1. Data Yang Digunakan 492
11.5.2. Komponen Analisis 493
11.5.3. Model Aljabar Analisis Shift-Share 497
11.5.4. Manfaat dan Keterbatasan Analisis 498
11.5.5. Contoh Penerapan Perhitungan 499

BAGIAN KELIMA :
AGENDA PENGEMBANGAN MENDATANG

Bab 12 Pengembangan Topik Bahasan 521
12.1. Perspektif Perencanaan 522
12.2. Dilema Membangun Struktur Industri Yang Kuat dan Meningkatkan Hasil Ekspor Yang Cepat 523
12.3. Keunggulan Kompetitif 534
12.4. Kluster Ekonomi 537

DAFTAR PUSTAKA 545
INDEKS 555

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Contoh Hipotesis Data Sebaran Fasilitas Kecamatan di Suatu Wilayah 104
Tabel 4.2. Hasil Akhir Urutan Tingkat Keterpusatan Kecamatan 106
Tabel 4.3. Urutan Tingkat Keterpusatan Kecamatan dengan Mengeliminasi Beberapa Fasilitas 108
Tabel 4.4. Data Hipotesis Sebaran Fasilitas dan Jumlahnya di Beberapa Kecamatan Dalam Satu Wilayah 111
Tabel 4.5. Perhitungan Indeks Fungsional 112
Tabel 4.6. Koreksi Orde Pusat Kegiatan Berdasarkan Model Zipf 114
Tabel 4.7. Jumlah Penduduk dan Jarak Hipotesis-8 Pusat Permukiman 128
Tabel 4.8. Potensial Demografik Hipotesis- 8 Pusat Permukiman 129
Tabel 4.9. Data Penjualan Bulanan dan Jarak Antar Lokasi-Hipotesis 133
Tabel 4.10. Hasil Perhitungan IPAP 133
Tabel 5.1. Contoh Tabel Transaksi Perdagangan Input-Output 179
Tabel 7. 1. Penduduk Perkotaan Dan Proporsi Sebarannya- 2003 270
Tabel 7.2. Tingkat Konsumsi Ekivalensi Beras Per Kapita Sebagai Indikator Kemiskinan (Sayogyo 1971) 281
Tabel 7.3. Indeks HDR-UNDP dan Indikatornya 285
Tabel 7.4. Matriks Kondisi Subyek versus Indikator Kemiskinan Ditinjau dari 3 Aspek: Sosial, Ekonomi dan Fisik 289
Tabel 7.5. Nilai PDRB 2005 (HK 2000) dan Proporsinya Per Wilayah 295
Tabel 7.6. Kerapatan Jalan dan Rasio Elektrifikasi Per Wilayah di Indonesia- Tahun 2000 dan 2004 296
Tabel 7.7. Penduduk dan Luas Wilayah- Jawa 2006 302
Tabel 7.8. Penduduk, Luas Wilayah- Jawa dan Konsentrasi Emisi 2006 305
Tabel 8.1. Distribusi Tenaga Kerja dan PDRB Sektoral Kota Bitung 2007 324

Tabel 8.2. PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2000 dan 2007 (HK 2000) 329
Tabel 8.3. PDRB dan Jumlah Penduduk Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah 2007 336
Tabel 8.4. Perhitungan Koefisien Gini untuk Sebaran PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah 339
Tabel 8.5. Contoh Tabel Transaksi Domestik Antar Sektor (Indonesia-2000)- Juta Rupiah 340
Tabel 8.6. Contoh Pergerakan Barang di Provinsi Jambi 2001 344
Tabel 8.7. Matriks Indeks Keterkaitan Pergerakan Barang di Provinsi Jambi 2001 345
Tabel 8.8. Urutan Indeks Keterkaitan Pergerakan Barang di Provinsi Jambi 2001 346
Tabel 8.9. Asal-Tujuan Pergerakan Kapal Laut yang Melalui: 17 Pelabuhan IBT- Makassar- Tanjung Perak - 2004 (Ribuan Ton- Barang) 348
Tabel 8.10. Perbandingan Data Profil Rumah Tangga yang Disajikan Dalam Podes Tahun 2003 dan 2006 351
Tabel 10.1. Model Dasar Tabel Input-Output 398
Tabel 10.2. Tabel Transaksi Perdagangan (Hipotesis) 406
Tabel 10.3. Matriks [A] Sistem Ekonomi Tertutup dan Terbuka 407
Tabel 10.4. Matriks [I –A] Sistem Ekonomi Tertutup dan Terbuka 408
Tabel 10.5. Matriks Invers Leontief $[I-A]^{-1}$ Sistem Ekonomi Tertutup dan Terbuka 409
Tabel 10.6. Perhitungan Efek Multiplier Total Output dengan Cara Matriks 415
Tabel 10.7. Komposisi Efek Pengali Total Output pada Sistem Ekonomi Terbuka 416
Tabel 10.8. Perhitungan Efek Multiplier Total Output dengan Cara Matriks 418
Tabel 10.9. Komposisi Efek Pengali Total Output Pada Sistem Ekonomi Tertutup 419
Tabel 10.10. Contoh Perhitungan Koefisien Tenaga Kerja 422

Tabel 10.11. Transaksi Domestik Atas Harga Produsen – Indonesia- 2000- 8 Sektor 426
Tabel 10.12. Matriks Koefisien Input atau Koefisien Perdagangan [A] 427
Tabel 10.13. Matriks [I-A] 428
Tabel 10.14. Invers Matriks Leontief [I-A] $^{-1}$ – Sistem Ekonomi Terbuka ** 429
Tabel 10.15. Nilai *Backward Multipliers* 429
Tabel 10.16. Koefisien Tenaga Kerja Indonesia 2000 - 8 Sektor 430
Tabel 10.17. Matris Diagonal Koefisien Tenaga Kerja Indonesia 2000 – 8 Sektor 430
Tabel 10.18. Efek Multiplier Tenaga Kerja Akibat Peningkatan Permintaan Akhir Sektoral Indonesia 2000 - 8 Sektor. 432
Tabel 10.19. Indeks Daya Penyebaran Dan Indeks Derajat Kepekaan Indonesia 2000 435
Tabel 10.20. Contoh Transaksi Perdagangan Antar Wilayah 439
Tabel 10.21. Hubungan Output Dan Permintaan Akhir pada Model Inter-Regional Input-Output 440
Tabel 10.22. Contoh Aliran Input Ke Sektor/ Komoditas pada Model Multi-Regional Input Output untuk 2 Wilayah 444
Tabel 11.1. Distribusi Tenaga Kerja Sektoral, Basis dan Non-basis- Indonesia 2000 457
Tabel 11.2. Distribusi PDRB Sektoral, Basis dan Non-basis- Indonesia 2000 458
Tabel 11.3. Distribusi PDRB Sektoral, Basis dan Non-basis dan Multiplier- Sulawesi Tengah 2000 & 2006 459
Tabel 11.4. Distribusi Persentase Tenaga Kerja Sektoral di 6 Kabupaten Sulsel 2005 (Penddk 280-330 Ribu) 462
Tabel 11.5. Perhitungan Analisis Persyaratan Minimum Tenaga Kerja Sektoral di 6 Kabupaten Sulawesi Selatan 2005 (Penduduk 280-330 Ribu) 463
Tabel 11.6. Contoh Penerapan Perhitungan Metoda LQ DKI vs Indonesia 471

Tabel 11.7. Tenaga Kerja Industri di Kawasan Cekungan Bandung (KCB) 474
Tabel 11.8. Porsi Sektor Wilayah Terhadap PDRB Nasional (PDRB 2004-HK 2000, Dalam Persen) 480
Tabel 11.9. Contoh Perhitungan Koefisien Lokalisasi Perekonomian Nasional Indonesia 482
Tabel 11.10. Contoh Penyiapan Tabel untuk Ploting Kurva Lokalisasi 484
Tabel 11.11. Porsi Masing-masing Sektor Dalam PDRB Wilayah (PDRB 2004-HK 2000, Dalam Persen) 487
Tabel 11.12. Contoh Perhitungan Koefisien Spesialisasi Wilayah Berdasarkan Porsi PDRB- 2004 488
Tabel 11.13. PDRB DKI Jaya dan PDB Nasional 1993-1995, Menurut Harga Konstan 1993 500
Tabel 11.14. Hasil Perhitungan Komponen Pertumbuhan Analisis *Shift-Share* DKI 93-95 501
Tabel 11.15. Proyeksi dan Sensitivitas Pertumbuhan PDRB DKI Jaya Tahun 1997 untuk Berbagai Skenario (Milyar Rupiah) 505
Tabel 11.16. Data PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara vs Indonesia (2000-2005)- HK 2000 (Juta Rp.) 509
Tabel 11.17. Perhitungan *Shift-Share* PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara vs Indonesia (2000-2005) 510
Tabel 11.18. Perhitungan Sensitivitas *Shift-Share* PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara vs Indonesia (2000-2005) 513

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Model Matematis Permintaan Pencipta Catur 3
Gambar 1.2. Peta Wilayah Negara Kepulauan Republik Indonesia 11
Gambar 2.1. Contoh Peta Lokasi Simpul Kegiatan 30
Gambar 2.2. Model Siklus Ekonomi Makro 42
Gambar 3.1. Grafik Sewa Lahan - Model 4 Kegiatan Pertanian von Thunen 55

Gambar 3.2. Model Cincin Lokasi Optimal - 4 Kegiatan Pertanian- von Thunen 57
Gambar 3.3. Hubungan Harga Sewa Lahan untuk Permukiman dan Nilai Fungsi Utilitas Permukiman Dinyatakan Terhadap Jarak dari CBD 61
Gambar 3.4. Model Tentative Kepadatan Penduduk Terhadap Jarak dari Pusat Kota 65
Gambar 3.5. Contoh Model Hubungan: 1 Lokasi Bahan Baku – 1 Pasar 70
Gambar 3.6a. Model Varignon 72
Gambar 3.6b. Segitiga Lokasi Weber 72
Gambar 3.7. Model Isotim dan Isodapane 74
Gambar 3.8. Optimasi Lokasi Industri Berdasar Jarak ke Sumber Bahan Baku 80
Gambar 4.1. Ambang Layanan (*Threshold*) dan Rentang Wilayah (*Range*) Model Central Place 93
Gambar 4.2. Proses Pembentukan Model Heksagon 94
Gambar 4.3. Contoh Struktur Pusat-Pusat Kegiatan dan Hirarki Pusat Kegiatan- K=3 (Pendekatan Pemasaran) 96
Gambar 4.4. Contoh Struktur Pusat-Pusat Kegiatan dan Hirarki Pusat Kegiatan- K=4 (Pendekatan Transportasi) 97
Gambar 4.5. Contoh Struktur Pusat-Pusat Kegiatan dan Hirarki Pusat Kegiatan- K=7 (Pendekatan Administratif) 98
Gambar 4.6. Model Hubungan Jumlah Penduduk dan Urutan Kota Menurut Zipf 109
Gambar 4.7. Grafik Hubungan Hirarki Pusat Kegiatan dan Indeks Fungsional 113
Gambar 4.8. Grafik Hubungan Hirarki Kota Dikoreksi dan Fungsional Indeks 114
Gambar 4.9. Hubungan Antara Harga, Permintaan dan Jarak dari Lokasi Produsen (Adaptasi dari Hoover – Giarratani) 118
Gambar 4.10. Jumlah Permintaan dan Daerah Luasan Pasar 119

Gambar 4.11. Model Persaingan Lokasi Usaha- Hotelling 121
Gambar 4.12. Model Peta Equipotensial Demografik 130
Gambar 4.13. Model Pendekatan Lokasi Berdasarkan Input/ Faktor Produksi 135
Gambar 4.14. Model Pendekatan Lokasi Berdasarkan Output/ Faktor Pasar 136
Gambar 4.15. Model Pendekatan Lokasi Berdasarkan Kombinasi Faktor Input dan Output 137
Gambar 5.1. *Isoquant* dan Berbagai Kondisi Return to Scale 162
Gambar 5.2. Komposisi Kontribusi Faktor-Faktor Produksi dan Faktor Produktivitas dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 1990-1996 169
Gambar 5.3. Garis *Isoquant* pada Model Input-Output 181
Gambar 6.1. Nilai Indeks RCA vs Nilai Ekspor- Sulawesi Selatan 2006 232
Gambar 6.2. Nilai Indeks RCA vs Nilai Ekspor- Sulawesi Selatan 2006 (Rinci untuk RCA Kecil) 233
Gambar 6.3. Konsumsi Petroleum Per Kapita Indonesia, Korea Selatan dan Beberapa Negara ASEAN 1980–2000 249
Gambar 6.4. Pendapatan Domestik Bruto (GDP) Per Kapita Indonesia, Korea Selatan dan Beberapa Negara ASEAN 1980-2000 250
Gambar 6.5. Indeks Kompetitif Global Indonesia, China dan Beberapa Negara ASEAN- 2003/2004 254
Gambar 6.6. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, China dan Beberapa Negara ASEAN- 2004 255
Gambar 6.7. Jumlah Prosedur dan Lamanya Proses (Hari) Memulai Usaha di Indonesia, China dan Beberapa Negara ASEAN – 2004 257
Gambar 6.8. 10 Kota- Skor Tertinggi dan 10 Kota- Skor Terendah dalam Hal Daya Tarik Investasi Tahun 2005 261
Gambar 6.9. 10 Kabupaten- Skor Tertinggi dan 10 Kabupaten- Skor Terendah dalam Hal Daya Tarik Investasi Tahun 2005 262

Gambar 7.1. Perkembangan Persentase Penduduk Perkotaan Indonesia 1970- 2005 268
Gambar 7.2. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Perkotaan dan Perdesaan Indonesia 1998- 2005 271
Gambar 7.3. PDRB Per Kapita Menurut Provinsi Tahun 2005- 5 Prov. Tertinggi dan 5 Prov. Terendah (HK 2000) 292
Gambar 7.4. PDRB Per Kapita Prov. di Jawa-Bali 2005 (HK 2000). 294
Gambar 7.5. Plotting Distribusi PDRB Provinsi di Indonesia-2005 - Koefisien Gini 300
Gambar 8.1. Contoh Diagram Struktur Umur Penduduk dan Indeks Rasio Ketergantungan 317
Gambar 8.2. IPM Provinsi di Indonesia 2006-2007 320
Gambar 8.3. Distribusi Sektoral Tenaga Kerja di Kota Bitung 2007... 323
Gambar 8.4. Sebaran Sektor Menurut Persentase PDRB vs Persentase Tenaga Kerja – Kota Bitung 2007..... 325
Gambar 8.5. Distribusi Porsi Tenaga Kerja vs Porsi PDRB Sektoral Kota Bitung 333
Gambar 8.6. Distribusi Porsi Tenaga Kerja vs Porsi PDRB Sektoral Provinsi Sulawesi Tengah 334
Gambar 8.7. Distribusi Spasial PDRB – Provinsi Sulawesi Tengah – 2007 338
Gambar 8.8. Garis Kemiskinan Berdasarkan Pengeluaran di Perkotaan, Perdesaan dan Gabungan Perkotaan-Perdesaan di Indonesia – Maret 2006 352
Gambar 9.1. Diagram Model Ekonomi Basis 364
Gambar 11.1. Kurva Lokalisasi Sektor Pertambangan dan Perhubungan Indonesia 2004 485
Gambar 11.2. Kurva Spesialisasi Wilayah Papua-Maluku-Nusa Tenggara dan Jawa-Bali Tahun 2004..... 490
Gambar 11.3. Diagram Konsep dari Model Perhitungan *Shift-Share* 494
Gambar 11.4. Posisi Kwadran Sektor Ekonomi DKI Jaya 1993-1995 504
Gambar 11.5. Peta Kinerja Perekonomian Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara- 9 Sektor..... 514

Gambar 11.6. Peta Kinerja Perekonomian Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara- 35 Sektor 515
Gambar 12.1. Porsi Produksi Biji Cokelat Dunia 2005/2006 525
Gambar 12.2. Porsi Konsumsi Produk Giling Cokelat Dunia 2005/2006 526
Gambar 12.3. Perkembangan Nilai Ekspor Kayu Lapis Indonesia 1992-2006 530
Gambar 12.4. Perkembangan Nilai Ekspor Kayu Lapis Beberapa Negara 2000-2004 531
Gambar 12.5. Model Intan Porter (*Porters' Diamond Model*)..... 536

Bab 1

PENDAHULUAN

BAGIAN PERTAMA:
PENDAHULUAN DAN PENGERTIAN DASAR

Bab 1
PENDAHULUAN

1.1. Prolog

Ada sebuah cerita tentang pencipta permainan catur. Dikisahkan sang Raja merasa sangat puas dengan permainan tersebut sehingga ia menawarkan hadiah kepada si pencipta permainan. Semula si pencipta enggan mengajukan permintaan hadiah karena takut dimurkai Raja. Namun karena sang Raja terus memaksa, maka berkatalah si pencipta catur itu: "Oh baginda Raja, permintaan hamba tidaklah banyak. Hamba ingin mengisi seluruh kotak catur hamba dengan beras. Untuk itu di hari pertama cukuplah hamba dikirimkan satu butir beras untuk mengisi kotak catur yang pertama. Hari kedua hamba mohon dikirimkan dua butir beras untuk mengisi kotak yang kedua, dan hari ketiga dikirimkan dua kali lipat dari jumlah beras hari kedua atau empat butir beras. Demikian seterusnya setiap hari hamba mohon dikirimkan beras sejumlah dua kali lipat dari jumlah sehari sebelumnya, hingga di hari ke 64 hamba dapat memenuhi seluruh isi kotak catur hamba".

Mendengar permintaan tersebut sang Raja tersenyum. Dia pikir bodoh sekali orang ini, diberi kesempatan minta hadiah yang banyak malah tidak dimanfaatkan dengan baik.

Tiga minggu dilalui dengan mulus, sang Raja mampu memenuhi permintaan si pencipta catur. Pada hari keduapuluhsatu jumlah beras yang diserahkan kepada si pencipta

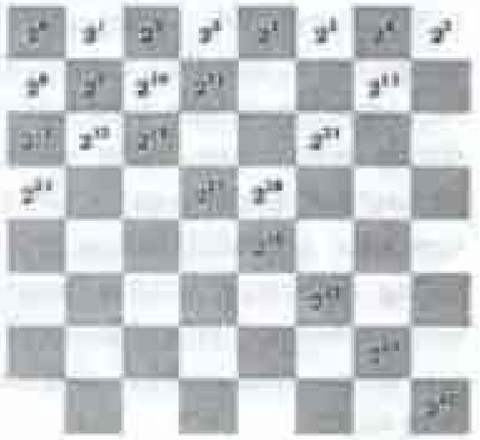

Gambar 1.1. Model matematis permintaan pencipta catur

adalah sebanyak 2^{20} = 1.048.576 butir. Jika satu kilogram beras berisi 100 ribu butir, maka pada hari ke-21 itu jumlah beras yang diserahkan sang Raja baru mencapai 10,4 kilogram.

Namun memasuki hari ketigapuluhsatu, bendahara kerajaan mulai khawatir karena hari itu ia harus mengirimkan beras sebanyak 10,7 ton (2^{30} = 1.073.741.824 butir) kepada si pencipta. Demikian seterusnya hingga pada hari ke 41 jumlah beras yang harus diserahkan ke si pencipta catur adalah sebanyak 10,9 ribu ton (2^{40} = 1.099.511.627.776 butir) dan di hari ke 51 mencapai 11,2 juta ton (2^{50} = 1.125.899.906.842.620 butir). Jika konsumsi beras per kapita penduduk sebesar 150 kg/tahun-kapita, maka jumlah beras untuk mengisi kotak ke 51 dapat menghidupi 75 juta penduduk selama setahun!!!. Pada tingkat ini bendahara kerajaan menyerah dan melapor kepada Raja bahwa cadangan beras kerajaan sudah hampir habis terkuras untuk memenuhi permintaan si pencipta permainan catur ...

Cerita di atas memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Pertama, **jangan pernah menyepelekan hal-hal yang kecil**. Dalam contoh di atas sang Raja menganggap remeh permintaan si pencipta catur, karena dia pikir permintaan tersebut hanya sebatas luasan papan catur saja. Dia terkecoh oleh ukuran luas papan catur dan tidak memikirkan besaran isi yang dimintakan. Seringkali kita terkecoh dengan sesuatu yang kita anggap kecil sehingga luput mengantipasi dan memperkirakan kemungkinan dampak yang dapat ditimbulkannya. Padahal bisa saja terjadi sesuatu hal yang kecil dapat menimbulkan dampak dan pengaruh yang sangat besar. Sebagai contoh misalkan efek pengganda ekonomi yang ditimbulkan oleh tenaga kerja Indonesia (TKI). Peran TKI sering diremehkan padahal kontribusi devisanya sangat besar. Misalkan setiap TKI mengirimkan 100 dollar AS per bulan ke kampungnya, dan total ada 1.000.000 TKI yang bekerja di seluruh dunia; maka tiap bulan perekonomian Indonesia akan menerima pemasukan devisa sebesar 100 juta dollar AS dari TKI, atau satu tahun mencapai 1,2 miliar dollar AS. Namun sayangnya potensi sebesar ini sering diabaikan, bahkan pelayanan terhadap TKI sering kali tidak serius sehingga potensi mereka tidak dapat ditingkatkan secara optimal. Kita sering lupa bahwa hal-hal besar dibangun dari kumpulan hal-hal yang kecil.

Pelajaran kedua adalah **pentingnya membuat model untuk mengukur sesuatu yang mungkin tidak mampu kita ukur secara fisik**. Sebagai contoh misalkan jarak dari bumi ke bulan, jarak dari bumi ke matahari, jari-jari bumi, dan sebagainya. Secara manual kita tidak mungkin mengukur jarak dari bumi ke bulan, untuk itu dibutuhkan suatu model pendekatan yang tepat dan efektif. Dalam kasus di atas, si pencipta catur tahu bahwa permintaannya merupakan fungsi eksponensial. Sementara itu sang Raja tidak paham sehingga merasa sanggup memenuhi permintaan tersebut. Jika sang Raja paham menggunakan model fungsi eksponensial tentunya ia akan menghitung terlebih dahulu sebelum menyanggupi permintaan tersebut. Misalkan untuk kotak ke 64, jumlah butir beras yang diminta dapat dihitung sebagai berikut = $2^{(64-1)} = 2^{63}$ = 9.223.372 trilliun butir beras yang ekivalen dengan 92,2 miliar ton beras (asumsi 1 kg beras = 100 ribu butir). Jumlah ini jelas tidak mungkin dapat dipenuhi oleh sang Raja.

Model merupakan salah satu alat yang sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat makro. Banyaknya variabel dalam analisis makro membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang besar untuk mengumpulkan data empiris atau primer. Oleh sebab itu, jika hubungan antar elemen dapat didekati dengan menggunakan model-model tertentu, maka berbagai kemungkinan variasi masalah dapat dianalisis dengan memakai model simulasi. Analisis permasalahan dengan menggunakan simulasi model akan sangat membantu mengurangi biaya dan waktu perencanaan.

Dalam kaitan dengan ilmu ekonomi kewilayahan, cakupan materi pembahasannya cenderung sangat luas dan kompleksitas analisisnya cukup tinggi. Ditinjau dari sisi pelaku dan domain lingkungannya lingkup kemungkinan interaksi yang terjadi sangat bervariasi, sehingga pada sisi analisis, ekonomi kewilayahan banyak berkaitan dengan cabang-cabang disiplin keilmuan yang lain. Oleh karena itu, untuk dapat menyelesaikan permasalahan kompleks tersebut, analisis ekonomi kewilayahan banyak membutuhkan permodelan sebagai salah satu alat analisisnya. Dan sebagaimana lazimnya dalam analisis ekonomi, pengaruh atau dampak dari perubahan suatu faktor dianalisis dengan menganggap pengaruh dari faktor-faktor yang lain sebagai konstanta (*ceteris paribus*).

Sebagai contoh misalkan model pengganda yang peranannya sangat penting dalam kajian perencanaan pembangunan. Model ini dilandasi oleh pemikiran bahwa setiap pemasukan devisa akan terdistribusi dan terinduksi ke seluruh kegiatan perekonomian sehingga menimbulkan efek pengganda. Oleh sebab itu, perekonomian yang mampu menciptakan rangkaian hubungan kegiatan internal yang saling memperkuat -baik secara langsung- maupun -tidak langsung- berpotensi menciptakan mekanisme pengganda. Intensitas mekanisme pengganda cenderung meningkat pada perekonomian yang memiliki hubungan interaksi antar sektor internal yang sangat kuat. Misalkan nilai pengganda suatu perekonomian sebesar 1,5 maka setiap pemasukan devisa sebesar 1 dollar akan dikembangkan dalam perekonomian tersebut menjadi senilai 1,5 dollar. Kembali ke contoh kasus TKI di muka, devisa yang dihasilkan selama setahun adalah sebesar 1,2 miliar dollar AS. Dengan mengasumsikan pengaruh faktor lain sebagai konstanta dan indeks pengganda ekonomi basis sebesar 1,5, maka jumlah tersebut diasumsikan akan mampu berkontribusi terhadap pembentukan PDB nasional sebesar 1,8 miliar dollar AS atau setara dengan 16 trilliun rupiah.

Model lain yang juga cukup populer dalam analisis ekonomi kewilayahan adalah model gravitasi yang sering dipergunakan untuk menganalisis interaksi dan tarik-menarik pengaruh antara dua atau lebih pusat kegiatan. Model ini pada dasarnya merupakan adopsi yang dikembangkan dari permodelan fisika. Mengingat ranah utama dari analisis ekonomi kewilayahan merupakan kombinasi dari ranah ilmu ekonomi dan ranah ilmu kewilayahan yang banyak berkaitan dengan ruang (spasial) di muka bumi, maka permodelan yang diterapkan tentunya banyak berkaitan dengan model ekonomi makro, mikro, dan kaidah-kaidah ilmu/hukum alam.

1.2. Ilmu Kewilayahan

Ilmu kewilayahan (*regional science*) merupakan cabang pengetahuan yang sangat luas cakupannya. Dalam konteks ilmu pengetahuan, geografi, ilmu pertanian, ekonomi, sosiologi dan antropologi memiliki kontribusi yang signifikan terhadap analisis kewilayahan. Karakter dan

sifat dari unsur-unsur sumberdaya keruangan (spasial) menjadi ranah kajian ilmu geografi dan pertanian (misal posisi lokasi, luas lahan, jarak, ketinggian lokasi, kemiringan lahan, sifat tanah, kesesuaian lahan *land suitability*, pola aliran sungai, curah hujan, dan iklim. Sementara itu, karakter dan sifat masyarakat (termasuk organisasi dan kelembagaan masyarakat, organisasi pemerintahan, pola sebaran permukiman, pola migrasi, pola mata pencaharian, pembagian tugas dalam keluarga, pola makan dan makanan pokok keluarga, dan sebagainya) sebagai pelaku utama dalam kegiatan pemanfaatan ruang menjadi topik kajian sosiologi dan antropologi. Sedangkan ilmu ekonomi cenderung menganalisis kegiatan penduduk pada berbagai tingkatan (individu-keluarga-masyarakat-perusahaan-industri) yang mencakup mulai dari sumber mata pencaharian keluarga, tingkat dan pola pendapatan serta pola pengeluaran keluarga, sebaran spasial harga, dan sebagainya, hingga agregat produksi, konsumsi, investasi, perdagangan ekspor-impor ke luar wilayah, transaksi perdagangan antar subsektor-intra wilayah.

Di lain pihak, dalam konteks ilmu terapan, ilmu kewilayahan juga berkaitan dengan disiplin ilmu yang menangani perencanaan, perancangan (*design*) dan pengelolaan. Hal ini terutama dibutuhkan dalam kaitannya dengan kegiatan pembangunan dan pengembangan wilayah. Dalam konteks ini disiplin ilmu keteknik-sipilan (termasuk arsitektur, planologi, teknik lingkungan, dan sebagainya) serta ilmu ekonomi dan pertanian terapan memiliki kontribusi yang besar. Perencanaan spasial tata ruang (struktur hirarki pusat pertumbuhan, pola pemanfaatan ruang: kawasan konservasi dan budidaya, kawasan perkotaaan dan perdesaan, zoning perumahan-bisnis-industri, dan sebagainya); perencanaan prasarana wilayah (sistem transportasi, sistem tata air dan drainase, sistem pengelolaan sampah regional, sistem pengelolaan limbah cair regional, dan sebagainya); perencanaan rinci lingkungan (fasad, tinggi bangunan, sempadan, jalan lingkungan, suplai air bersih, pengelolaan limbah rumah tangga, dan sebagainya); perencanaan lokasi industri, perencanaan jenis kegiatan industri; perencanaan lokasi dan jenis kegiatan pertanian, dan sebagainya merupakan contoh dari kegiatan pengembangan wilayah. Tentunya selain disiplin ilmu di atas masih banyak lagi disiplin ilmu lain yang ikut berkontribusi terhadap ilmu kewilayahan.

Dari uraian di atas terlihat sifat pendekatan analisis ilmu kewilayahan cenderung holistik dan multi-disiplin. Namun, satu hal yang mendasar dari ilmu kewilayahan adalah bahwa lingkup kajiannya meliputi ranah (*domain*) dari unsur keruangan. Dengan demikian, pembahasan yang dilakukan oleh ilmu kewilayahan akan selalu berkaitan dengan unsur keruangan.

Buku ini membahas topik tentang ekonomi kewilayahan, yang merupakan salah satu bagian dari ilmu kewilayahan. Untuk itu topik yang disajikan akan dibatasi pada kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan aspek keruangan. Beberapa konsep yang dibahas dan analisis yang dikembangkan pada umumnya merupakan upaya dalam rangka mencari dan menjelaskan hubungan keterkaitan antara kegiatan ekonomi dan ruang sebagai tempat kedudukannya. Dalam konteks ini maka wilayah (*region*) diartikan sebagai bagian dari ruang (*space*) yang merupakan entitas analisis dalam ilmu kewilayahan. Model-model analisis yang digunakan umumnya diadopsi dari model ekonomi mikro, makro, model geografis-sosial, dan model fisika. Sementara itu, sebagian besar teknik pendekatan yang digunakan pada dasarnya mengacu kepada teknik yang umum digunakan dalam ilmu ekonomi yakni pengamatan empiris, analisis statistik, analisis ekonomi dan pendekatan uji eksperimental menggunakan simulasi model.

1.3. Fondasi Pokok, Pertanyaan Kunci dan Lingkup Studi Ekonomi Kewilayahan

Mengapa ilmu ekonomi kewilayahan penting? Menurut Hoover, paling tidak ada tiga alasan atau fondasi pokok mengapa ekonomi kewilayahan menjadi penting untuk dipelajari, yakni[1] :

- sifat faktor produksi (terutama sumberdaya alam) yang tidak dapat dipindahkan;
- sifat proses produksi yang sukar dipisahkan; dan
- pemindahan barang dan jasa mempersyaratkan adanya biaya transportasi.

Hal yang pertama, sumberdaya alam pada umumnya merupakan karunia alam di lokasi tertentu, misalkan beberapa negara di jazirah Arab kaya akan sumberdaya minyak bumi, Papua kaya akan bahan tambang tembaga dan emas, Sulawesi kaya akan nikel, dan sebagaianya. Hal ini membuat suatu lokasi menjadi memiliki *keunggulan komparatif* tertentu dibandingkan dengan lokasi lain.

Hal yang kedua, kegiatan proses produksi pada beberapa industri seringkali sukar dipisah-pisahkan. Hal ini dapat disebabkan oleh karena adanya saling ketergantungan teknis pada rangkaian proses produksi ataupun karena alasan efisiensi biaya promosi, pemasaran, dan sebagainya. Fenomenon aglomerasi merupakan contoh dari fondasi pokok yang kedua ini.

Fondasi pokok yang ketiga adalah biaya transportasi yang pada umumnya dan secara tradisional merupakan fungsi dari jarak. Semakin jauh jarak angkut pemindahan barang dan jasa, semakin mahal biaya angkutan yang dibutuhkan.

Ketiga fondasi di atas menurut Hoover merupakan alasan dasar mengapa ekonomi wilayah menjadi penting untuk dipelajari.

Selanjutnya, berkaitan dengan pengertian dan batasan wilayah sebagai satuan entitas analisis, beberapa pertanyaan kunci yang melandasi analisis ekonomi kewilayahan adalah:

- bagaimana wilayah tumbuh dan berkembang membentuk karakter mereka?
- bagaimana wilayah saling berinteraksi dengan wilayah lain baik dalam hal saling ketergantungan, maupun saling bersaing pengaruh dan sebagainya?
- mengapa suatu lokasi lebih disukai untuk konsentrasi kegiatan ekonomi dibandingkan dengan lokasi yang lain; dan seberapa efektif suatu lokasi dapat berperan dalam mendorong pengembangan wilayah di sekitarnya?

Pertanyaan tersebut di atas membawa kita kepada lingkup kajian ekonomi kewilayahan yang secara garis besar meliputi beberapa aspek seperti pertumbuhan wilayah, karakter atau struktur ekonomi internal wilayah, interaksi ekonomi antar wilayah, kecenderungan konsentrasi

lokasi industri, dan peranan lokasi sebagai pendorong pengembangan wilayah sekitarnya.

Pentingnya pengetahuan ekonomi kewilayahan bagi lingkup Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan komposisi pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar luas, yang masing-masingnya dihubungkan oleh laut atau selat dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (lihat Gambar 1.2). Penduduk Indonesia tersebar di seluruh wilayah kepulauan, terutama di pulau-pulau besar, khususnya di Jawa dan Sumatera.

Kondisi geografis kepulauan Indonesia membuat perekonomian Indonesia dapat dipilah-pilah menjadi beberapa entitas perekonomian wilayah pulau atau kepulauan yang terpisah secara alamiah. Namun masing-masing entitas tentunya tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya secara mandiri sehingga mereka memiliki saling ketergantungan satu sama lain. Bahkan meskipun suatu entitas ekonomi mampu memproduksi barang kebutuhan tertentu, untuk memenuhi seluruh kebutuhan lokal, mereka tetap akan melakukan impor barang tersebut dari entitas lain yang memiliki keunggulan komparatif dalam hal memproduksi barang yang sama. Dalam hal ini sesuai dengan konsep dalam aliran ekonomi neo-klasik, faktor keunggulan komparatif justru menjadi (salah satu) penggerak utama terjadinya perdagangan antar wilayah. Oleh sebab itu, keterkaitan perdagangan antar pulau merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang menentukan kekuatan struktur internal perekonomian kepulauan. Dan berkaitan dengan fondasi ketiga dari Hoover, efisiensi biaya transfer barang dan jasa antar pulau menjadi salah satu aspek penting yang perlu diamati dalam konteks ekonomi kewilayahan di Indonesia.

Sumber: Indonesia Map (Shaded Relief) U.S. Central Intelligence Agency 2002 - Courtesy of the University of Texas Libraries, The University of Texas at Austin.

Gambar 1.2. Peta Wilayah Negara Kepulauan Republik Indonesia

Dengan kondisi geografis kepulauan, pengetahuan akan ilmu ekonomi kewilayahan dibutuhkan untuk menganalisis struktur 'anatomi' dari perekonomian wilayah Indonesia, baik pada tingkat entitas perekonomian lokal wilayah pulau maupun pada tingkat entitas wilayah nasional. Pengetahuan akan struktur ekonomi intra wilayah lokal dan hubungan keterkaitan antar wilayah lokal yang membentuk kesatuan perekonomian nasional Indonesia menjadi aspek kajian yang menarik dari sisi ilmu perekonomian wilayah.

Perkembangan pembangunan di Indonesia belakangan ini menunjukkan kecenderungan yang mengarah kepada semakin besarnya kesenjangan pertumbuhan antar wilayah, terutama antara wilayah Jawa dan luar Jawa. Supremasi wilayah pulau Jawa yang sangat dominan telah menimbulkan efek *cumulative causation* di mana dampak *spread effect*-nya sangat rendah dibandingkan dengan kekuatan *backwash effect*. Intensitas proses penghisapan sumberdaya (alam, manusia dan faktor produksi) dari wilayah-wilayah lain sangat tinggi sedangkan pertumbuhan di Jawa sendiri ternyata tidak banyak merangsang atau mendorong pertumbuhan wilayah luar Jawa. Dalam hal ini terjadi proses ketidakseimbangan perdagangan yang berkelanjutan yang dalam

jangka panjang justru merusak struktur kekuatan internal perekonomian Indonesia, karena hal ini cenderung membentuk konsentrasi ekonomi di satu lokasi saja sehingga tidak sesuai dengan karakter geografis kepulauan Indonesia. Sebagai ilustrasi, sebagaimana dibahas dalam Bab 7, sekitar 61,4% dari total nilai PDB nasional terbentuk di wilayah Jawa-Bali; yang artinya dominansi perekonomian wilayah Jawa-Bali mencapai 1,5 kali lipat wilayah luar Jawa-Bali. Padahal jika ditinjau dari persentase luas wilayah, Jawa-Bali hanya mencakup sekitar 8% dari luas wilayah Indonesia.

Sementara itu, daya dukung pulau Jawa yang terbatas juga berdampak kepada semakin langkanya sumberdaya alam yang pada gilirannya akan membuat nilai investasi per satuan produksi menjadi mahal. Pada saat ini hal tersebut memang belum terasa, karena mahalnya sumberdaya alam (lahan dan air) masih dapat dikompensasi oleh murahnya biaya infrastruktur penunjang (listrik dan transportasi). Kondisi infrastruktur penunjang di Jawa saat ini dibandingkan dengan di luar Jawa memang relatif masih lebih baik. Hal ini pula yang menyebabkan industri cenderung agak malas untuk beroperasi di luar Jawa. Namun bila hal ini terus berlangsung, maka biaya dampak lingkungan dan dampak sosial di pulau Jawa akan terus meningkat dan menjadi beban serta ancaman bagi seluruh penduduknya. Tabel 7.8 di Bab 7 memperlihatkan sekitar 62% emisi gas buangan kendaraan bermotor di Indonesia terkonsentrasi di Jawa yang luasnya hanya 7% dari total luas wilayah Indonesia.

1.4. Sistematika Isi Buku

Susunan isi buku ini terdiri atas lima bagian, yakni:

BAGIAN PERTAMA: Pendahuluan dan Pengertian Dasar: Bab 1 dan Bab 2

BAGIAN KEDUA: Teori Lokasi: Bab 3 dan Bab 4

BAGIAN KETIGA: Perspektif Analisis: Bab 5, Bab 6, dan Bab 7

BAGIAN KEEMPAT: Perangkat Analisis: Bab 8, Bab 9, Bab 10, dan Bab 11

BAGIAN KELIMA: Agenda Pengembangan Mendatang : Bab 12

Bagian Pertama merupakan bagian pendahuluan dan pengertian dasar yang berisikan latar belakang perlunya mempelajari ilmu ekonomi kewilayahan, beberapa fondasi pokok, pertanyaan-pertanyaan kunci, lingkup studi, dan pengertian-pengertian dasar kewilayahan. Pengertian wilayah dalam ilmu kewilayahan dibatasi sebagai sebuah satuan entitas ruang tertentu yang digunakan untuk keperluan analisis kewilayahan. Sedangkan dalam konteks ekonomi kewilayahan, wilayah diartikan sebagai satuan entitas ruang yang melingkupi kegiatan perekonomian, dan studi ekonomi kewilayahan dipandang sebagai upaya untuk memahami karakter keruangan dari sistem ekonomi. Bagian Pertama ini disajikan dalam Bab 1- Pendahuluan dan Bab 2- Pengertian Dasar Kewilayahan.

Analisis ekonomi kewilayahan banyak menggunakan permodelan yang diadopsi dari ekonomi makro, ekonomi mikro maupun ilmu lain khususnya geografi dan fisika. Penggunaan model tersebut pada umumnya digunakan untuk menganalisis **hubungan elemen-elemen internal** dalam wilayah, **hubungan antar wilayah**, dan **kecenderungan terbentuknya konsentrasi kegiatan** di lokasi tertentu. Dalam melakukan analisis tersebut, lokasi terkadang diasumsikan sebagai suatu satuan simpul massa ('lumped mass' atau nodal), sehingga interaksi analisis dimodelkan sebagai interaksi antar simpul massa. Pada kasus-kasus terbentuknya konurbasi di mana daya tarik suatu pusat massa sangat besar mempengaruhi daerah sekitarnya, terjadi proses pengembangan pusat massa yang 'menelan' sub-pusat massa sekitarnya, sehingga model interaksi dalam wilayah tersebut berubah menjadi suatu medium yang kontinum.

Sebagai suatu entitas ekonomi, perekonomian suatu wilayah sering dimodelkan secara makro seperti pada perekonomian nasional. Dari sisi pengeluaran misalnya, pendapatan atau produk domestik bruto wilayah dinyatakan dengan menerapkan hubungan dari beberapa agregat elemen seperti konsumsi, investasi, belanja pemerintah, ekspor dan impor. Sedangkan dari sisi produksi, produk domestik bruto wilayah dinyatakan sebagai hasil penjumlahan dari nilai tambah sektoral.

Bagian Kedua berisikan pengenalan dasar terhadap teori lokasi yang merupakan salah satu basis dalam analisis ekonomi kewilayahan,

khususnya berkaitan dengan aspek spasial. Hal yang dibahas dalam konteks teori lokasi pada umumnya berkaitan dengan isu konsentrasi dan distribusi lokasi usaha. Analisis yang diterapkan pada umumnya menggunakan pendekatan model mikro ekonomi dengan memasukkan jarak atau biaya transportasi sebagai salah satu variabel bebas yang mempengaruhi persamaan biaya, persamaan pendapatan maupun keuntungan. Bagian Kedua ini terdiri atas Bab 3 dan Bab 4.

Pembahasan pada Bab 3 dimulai dari teori lokasi klasik yang dipelopori oleh von Thunen dengan model sebaran kegiatan usaha (pertanian) yang konsentris terhadap pusat kota, dilanjutkan dengan model Alonso yang menggambarkan kecenderungan tata guna lahan di perkotaaan dan sebaran lokasi permukiman terhadap jarak dari pusat kota (*Central Business District*). Kedua model memiliki kesamaan dalam hal konsentris dan monosentrik terhadap pusat serta kecenderungan membentuk gradien yang kontinum terhadap jarak dengan pola radial simetris.

Teori klasik lainnya adalah teori lokasi industri Weber yang dibangun berdasarkan pendekatan biaya lokasi terkecil yang meliputi biaya transportasi, biaya tenaga kerja, dan efisiensi biaya akibat aglomerasi ekonomi. Kombinasi biaya terkecil dari ketiga faktor tersebut memberikan lokasi yang paling murah bagi suatu industri. Pada Bab ini dibahas pula beberapa contoh analisis optimasi lokasi industri berdasarkan jarak (ongkos angkut) ke sumber bahan baku. Model ini pada dasarnya merupakan contoh pendekatan yang berorientasi ke input.

Bab 4 menyajikan beberapa pendekatan lain dalam analisis teori lokasi. Selain mempelajari kecenderungan sebaran lokasi industri, berkembang pula analisis teori lokasi yang mendalami hubungan fungsional antar pusat-pusat kegiatan dan mencoba mencari hubungan hirarkisnya. Dalam hal ini, Christaller merupakan salah seorang pelopornya, yang kemudian diikuti oleh Losch. Teori tempat sentral (*central places*) yang dikembangkan Christaller sering dijadikan acuan untuk menganalisis hubungan hirarkis antar pusat-pusat kegiatan. Jumlah penduduk, ketersediaan fasilitas dan luasan daerah pelayanan sering menjadi faktor pertimbangan utama dalam analisis hirarki fungsional pusat kegiatan.

Sementara itu, berkembang pula model-model analisis daerah pengaruh atau luasan pasar suatu pusat kegiatan yang mengacu kepada hukum gravitasi Newton. Model-model ini sering diterapkan untuk menganalisis lokasi usaha khususnya dalam bidang *retail*. Salah satu contoh model analisis yang disajikan dalam Bab 4 ini adalah Indeks Potensial Akses ke Pasar yang dapat digolongkan sebagai jenis pendekatan yang berorientasi ke pasar.

Dalam kaitan dengan analisis keputusan lokasi industri individual (berdasarkan daerah luasan pasar), model Hotelling menjadi salah satu pelopor yang memperlihatkan persaingan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya kecenderungan konsentrasi lokasi usaha. Sedangkan Hoover melihat kecenderungan lokasi usaha ditinjau dari dua faktor: kohesif yang cenderung membentuk konsentrasi lokasi dan dispersif yang cenderung membentuk penyebaran lokasi.

Jika kecenderungan konsentrasi lokasi (aglomerasi) versi Weber lebih banyak didasarkan kepada upaya efisiensi biaya, maka Marshall menjelaskannya dari sisi persaingan usaha dan eksternalitas di lokasi konsentrasi industri. Artinya, industri cenderung memilih lokasi yang banyak memiliki industri sejenis namun kaya dengan potensi faktor-faktor eksternal yang diharapkan dapat mendorong kemajuan bagi industri itu sendiri. Lokasi industri di Silicon Valley misalnya dianggap dapat memacu kreativitas suatu industri teknologi informasi karena lingkungannya sangat dinamis, kreatif dan inovatif. Begitu pula misalnya dengan industri garmen di Cihampelas Bandung. Setiap minggu hampir selalu muncul kreasi baru sehingga setiap toko di sana terdorong untuk selalu mencari dan menciptakan model-model yang inovatif. Selain dampak positif dari persaingan industri sejenis (horizontal), berkumpulnya industri sejenis di suatu lokasi juga berpotensi menimbulkan faktor eksternalitas lain seperti ketersediaan pasar atau stock sumberdaya manusia yang terampil, serta berkembangnya industri-industri pendukung (vertikal).

Bagian Ketiga dari buku ini berisikan beberapa perspektif analisis yang sering ditemui dalam melakukan analisis ekonomi kewilayahan. Pembahasannya disajikan pada Bab 5, Bab 6, dan Bab 7.

Pada Bab 5 dibahas beberapa perspektif analisis pengembangan wilayah mulai dari teori ekonomi neo-klasik, teori pertumbuhan, peranan teknologi, eksternalitas, dan faktor endogen yang cenderung konvergen, serta kecenderungan diversifikasi usaha untuk mempertahankan diri dan mempertahankan eksistensi usaha. Teknologi menjadi salah satu faktor penting yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja perekonomian wilayah secara keseluruhan. Sayangnya, beberapa kajian terhadap **dunia industri di Indonesia menunjukkan peran kapital yang sangat dominan tetapi tidak diimbangi oleh tingginya produktivitas dan tingginya peran teknologi**. Menjadi pertanyaan di sini bagaimana strategi transfer pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh industri penanaman modal asing di Indonesia.

Dalam konteks ekonomi kewilayahan, strategi pengembangan konsentrasi industri pada lokasi-lokasi khusus memberikan kemungkinan yang lebih besar bagi terselenggaranya proses pengalihan teknologi baik secara vertikal maupun horizontal. Kewirausahaan yang dilandasi kreativitas dan inovasi juga menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kekuatan endogen. Sementara itu, kemampuan daya saing produksi dan sinergi antar wilayah juga menjadi faktor yang tak boleh terlupakan dalam persiapan menghadapi persaingan global.

Bab 6 mengulas beberapa hal yang berkaitan dengan perspektif daya tarik lokasi seperti: keunggulan komparatif - sumberdaya lokal dan faktor-faktor pendukung lain seperti infrastruktur dan kelembagaan. Keunggulan komparatif khususnya dalam hal sumberdaya alam pada umumnya merupakan modal dasar bagi wilayah untuk mengembangkan pereknomiannya. Mengingat untuk mengeksploitasi sumberdaya lokal dibutuhkan modal, maka topik yang berkembang adalah bagaimana upaya pemerintah daerah menarik modal dari luar untuk diinvestasikan di wilayahnya. Dalam hal ini maka daya tarik lokasi tidak saja ditentukan oleh faktor keunggulan komparatif yang bersifat natural, namun juga dipengaruhi oleh kelengkapan dan kinerja faktor-faktor pendukung seperti infrastruktur dan kelembagaan.

Dalam Bab ini dibahas pula bagaimana lembaga-lembaga dunia seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan lain-lain, mengukur kinerja global daya tarik investasi masing-masing negara dan kriteria

pengukurannya. Di lain pihak, hambatan usaha internal dalam negeri dipandang dari sudut pengusaha dalam negeri, peranan pemerintah lokal dan faktor-faktor lingkungan usaha lokal juga dikaji oleh beberapa lembaga lokal. Sebagai contoh misalnya lembaga KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) selama beberapa tahun sejak tahun 2001 telah melakukan kajian dan menyusun peringkat daya tarik investasi daerah di tingkat kabupaten-kota di Indonesia.

Bab 7 mengulas pendekatan analisis ekonomi kewilayahan ditinjau dari beberapa perspektif lain yang cukup sering ditemui dalam beberapa kajian. Beberapa perspektif tersebut antara lain adalah: perspektif desa-kota (ketimpangan pembangunan- cumulative causation effect- desa semakin tersedot kota), kemiskinan dan pemerataan, pengembangan ekonomi lokal, dan pembangunan yang akrab lingkungan.

Dikotomi pembangunan desa-kota merupakan salah satu topik klasik yang sudah cukup lama diperbincangkan orang. Sebagian ahli cenderung menganjurkan pembangunan yang berbasis sektor perdesaan dengan alasan bahwa desa merupakan kondisi inisial pembangunan yang *'given'* dan sumberdaya primer pada umumnya berada didesa. Beberapa ahli yang lain cenderung menganjurkan pembangunan yang lebih berorientasi ke sektor perkotaan mengingat sektor ini cenderung lebih kreatif dan dinamis sehingga pengembangan daya saing relatif lebih mudah. Penganut paham yang kedua cenderung berpendapat bahwa kota yang maju akan mampu membangkitkan kemajuan di daerah sekitarnya termasuk daerah perdesaan melalui mekanisme efek sebar dan efek tetes ke bawah. Meskipun hipotesis tantang sudah banyak dibuktikan kegagalannya, dan dampak *cumulative causation* di mana terjadi akumulasi kepincangan perdagangan desa-kota akibat efek sebar yang lebih rendah dari efek hisap (*backwash effect*), sudah banyak diulas para ahli,namun penganut paham kedua tetap tidak surut. Salah satu fenomenayang mendukung mereka adalah bahwa jumlah dan proporsi penduduk perkotaan di dunia cenderung semakin meningkat. Sebagai contoh, di Indonesia proporsi jumlah penduduk perkotaan pada tahun 1970 masih di bawah 20%, namun di tahun 2005 proporsinya sudah meningkat pesat menjadi sekitar 50% dari total jumlah penduduk.

Hal lain yang menjadi salah satu topik penting dalam analisis ekonomi kewilayahan adalah isu kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Isu kemiskinan banyak berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusia dan akses masyarakat ke berbagai fasilitas sosial-ekonomi-politik. Sedangkan isu pemerataan pembangunan selain berkaitan dengan permasalahan akses ke lapangan kerja atau permasalahan lain yang berkaitan dengan isu sektoral, isu ini juga mencakup aspek spasial. Di beberapa negara yang menghadapi permasalahan kemiskinan, permasalahan ketidakmerataan pembangunan juga terjadi pada konteks regional (misalkan kesenjangan ekonomi desa-kota). Indonesia sebagai negara kepulauan juga menghadapi permasalahan yang serius dengan ketidakmerataan atau kesenjangan ekonomi antar wilayah. Sebagaimana sudah disinggung di muka dan juga dibahas dalam Bab , sebagian besar (sekitar 60%) PDB Indonesia terbentuk di wilayah Jawa yang luasnya hanya sekitar 7% wilayah Indonesia.

Pembangunan yang cenderung terkonsentrasi di Jawa sangat mengeksploitasi sumberdaya alam sehingga mendekati batas ambang daya dukungnya. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius dan untuk itu upaya pengalihan tekanan pembangunan ke lokasi di luar Jawa seyogyanya sudah harus dilakukan seintensif mungkin.

Bagian Keempat dari buku ini berisikan beberapa hal yang berkaitan dengan perangkat analisis ekonomi kewilayahan. Pada Bab 8 dibahas secara umum beberapa data pokok dan data penunjang yang biasa dibutuhkan untuk keperluan analisis ekonomi kewilayahan.

Bab 9 membahas tentang konsep ekonomi basis yang sering dijadikan salah satu fondasi dalam analisis ekonomi kewilayahan. Berdasarkan konsep ini, struktur perekonomian suatu wilayah dimodelkan terdiri atas dua sektor: basis dan non-basis. Konsep ini juga memperkenalkan konsep efek penggandaan (*multiplier effect*) yang menunjukkan peran struktur ekonomi internal (sektor non-basis) dalam memanfaatkan pendapatan sektor basis yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja perekonomian wilayah secara keseluruhan.

Bab 10 membahas model analisis Input-Output ekonomi yang merupakan salah satu tulang punggung dalam analisis ekonomi kewilayahan. Model ini dapat dipandang sebagai kombinasi dari pengembangan model ekonomi basis dan transaksi domestik antar sektor dalam suatu wilayah. Dengan menggunakan model ini, perhitungan dampak ekonomi atau efek penggandaan dari pertumbuhan suatu sektor atau kegiatan produksi dapat dilakukan secara lebih rinci, sehingga selanjutnya dapat diketahui sektor-sektor yang memiliki dampak penggandaan terbesar terhadap kinerja perekonomian wilayah.

Pada Bab 11 dibahas beberapa perangkat alat analisis praktis yang biasa digunakan dalam analisis ekonomi kewilayahan. Beberapa metode yang disajikan di sini antara lain: metode teknik asumsi, analisis persyaratan minimum, Location Quotient (LQ), koefisien lokalisasi dan spesialisasi, analisis Shift-Share, dan analisis sensitivitas pertumbuhan.

Bagian Kelima merupakan bagian penutup dari keseluruhan buku ini yang berisikan agenda pengembangan mendatang dan disajikan dalam Bab 12. Pada bagian ini dibahas beberapa pemikiran sebagai bahan bagi agenda pengembangan lebih lanjut. Mengingat lingkup isi buku ini belum banyak menyinggung aspek perencanaan pembangunan ekonomi kewilayahan, maka beberapa catatan mengenai perspektif perencanaan disajikan sebagai bahan pengantar.

Pengembangan industri merupakan suatu keharusan bagi strategi pengembangan ekonomi kewilayahan pada era perdagangan bebas. Nilai efek penggandaan yang relatif tinggi, kemampuan untuk menghasilkan devisa ekspor, potensi bagi pengembangan lapangan kerja, serta potensi bagi peningkatan produktivitas dan daya saing sumberdaya manusia merupakan beberapa nilai positif dari upaya pengembangan industri nasional/regional. Selain itu pengembangan struktur industri yang kuat sangat dibutuhkan dalam rangka menghadapi perdagangan global yang menuntut peningkatan daya saing produk hingga ke tingkat lokal. Namun dalam implementasinya seringkali kita dihadapkan kepada dilemma antara keperluan jangka pendek mendatangkan hasil espor secara cepat dan kebutuhan jangka panjang mengembangkan struktur industri yang kuat. Upaya mengem-

Hal lain yang menjadi salah satu topik penting dalam analisis ekonomi kewilayahan adalah isu kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Isu kemiskinan banyak berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusia dan akses masyarakat ke berbagai fasilitas sosial-ekonomi-politik. Sedangkan isu pemerataan pembangunan selain berkaitan dengan permasalahan akses ke lapangan kerja atau permasalahan lain yang berkaitan dengan isu sektoral, isu ini juga mencakup aspek spasial. Di beberapa negara yang menghadapi permasalahan kemiskinan, permasalahan ketidakmerataan pembangunan juga terjadi pada konteks regional (misalkan kesenjangan ekonomi desa-kota). Indonesia sebagai negara kepulauan juga menghadapi permasalahan yang serius dengan ketidakmerataan atau kesenjangan ekonomi antar wilayah. Sebagaimana sudah disinggung di muka dan juga dibahas dalam Bab , sebagian besar (sekitar 60%) PDB Indonesia terbentuk di wilayah Jawa yang luasnya hanya sekitar 7% wilayah Indonesia.

Pembangunan yang cenderung terkonsentrasi di Jawa sangat mengeksploitasi sumberdaya alam sehingga mendekati batas ambang daya dukungnya. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius dan untuk itu upaya pengalihan tekanan pembangunan ke lokasi di luar Jawa seyogyanya sudah harus dilakukan seintensif mungkin.

Bagian Keempat dari buku ini berisikan beberapa hal yang berkaitan dengan perangkat analisis ekonomi kewilayahan. Pada Bab 8 dibahas secara umum beberapa data pokok dan data penunjang yang biasa dibutuhkan untuk keperluan analisis ekonomi kewilayahan.

Bab 9 membahas tentang konsep ekonomi basis yang sering dijadikan salah satu fondasi dalam analisis ekonomi kewilayahan. Berdasarkan konsep ini, struktur perekonomian suatu wilayah dimodelkan terdiri atas dua sektor: basis dan non-basis. Konsep ini juga memperkenalkan konsep efek penggandaan (*multiplier effect*) yang menunjukkan peran struktur ekonomi internal (sektor non-basis) dalam memanfaatkan pendapatan sektor basis yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja perekonomian wilayah secara keseluruhan.

Bab 10 membahas model analisis Input-Output ekonomi yang merupakan salah satu tulang punggung dalam analisis ekonomi kewilayahan. Model ini dapat dipandang sebagai kombinasi dari pengembangan model ekonomi basis dan transaksi domestik antar sektor dalam suatu wilayah. Dengan menggunakan model ini, perhitungan dampak ekonomi atau efek penggandaan dari pertumbuhan suatu sektor atau kegiatan produksi dapat dilakukan secara lebih rinci, sehingga selanjutnya dapat diketahui sektor-sektor yang memiliki dampak penggandaan terbesar terhadap kinerja perekonomian wilayah.

Pada Bab 11 dibahas beberapa perangkat alat analisis praktis yang biasa digunakan dalam analisis ekonomi kewilayahan. Beberapa metode yang disajikan di sini antara lain: metode teknik asumsi, analisis persyaratan minimum, Location Quotient (LQ), koefisien lokalisasi dan spesialisasi, analisis Shift-Share, dan analisis sensitivitas pertumbuhan.

Bagian Kelima merupakan bagian penutup dari keseluruhan buku ini yang berisikan agenda pengembangan mendatang dan disajikan dalam Bab 12. Pada bagian ini dibahas beberapa pemikiran sebagai bahan bagi agenda pengembangan lebih lanjut. Mengingat lingkup isi buku ini belum banyak menyinggung aspek perencanaan pembangunan ekonomi kewilayahan, maka beberapa catatan mengenai perspektif perencanaan disajikan sebagai bahan pengantar.

Pengembangan industri merupakan suatu keharusan bagi strategi pengembangan ekonomi kewilayahan pada era perdagangan bebas. Nilai efek penggandaan yang relatif tinggi, kemampuan untuk menghasilkan devisa ekspor, potensi bagi pengembangan lapangan kerja, serta potensi bagi peningkatan produktivitas dan daya saing sumberdaya manusia merupakan beberapa nilai positif dari upaya pengembangan industri nasional/regional. Selain itu pengembangan struktur industri yang kuat sangat dibutuhkan dalam rangka menghadapi perdagangan global yang menuntut peningkatan daya saing produk hingga ke tingkat lokal. Namun dalam implementasinya seringkali kita dihadapkan kepada dilemma antara keperluan jangka pendek mendatangkan hasil espor secara cepat dan kebutuhan jangka panjang mengembangkan struktur industri yang kuat. Upaya mengem-

bangkan struktur industri yang kuat membutuhkan waktu yang relatif panjang serta dukungan komitmen dari berbagai pihak; baik dukungan pada berbagai level kebijakan pemerintahan (nasional-provinsi-kabupaten), maupun dukungan dari berbagai 'stakeholders' (pengusaha swasta dan masyarakat).

Pemerintah Indonesia sejak 1999 sudah melaksanakan reformasi pemerintahan khususnya dalam bidang otonomi daerah. Di lain pihak Indonesia juga menghadapi dampak dari perkembangan ekonomi global yang semakin merasuk ke sendi-sendi kehidupan masyarakat. Persaingan kini tidak hanya dihadapi perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor-impor, tetapi juga oleh perusahan domestik, bahkan perusahaan lokal. Persaingan global sudah mendekati halaman rumah perekonomian wilayah domestik dan tidak ada kekuatan yang dapat mencegahnya. Untuk itu Indonesia butuh upaya memperkuat kegiatan usaha lokal agar mampu mengimbangi persaingan dengan perusahaan global. Pemerintah tidak dapat berpangku tangan dan terus menerus mengeluarkan kebijakan yang menghambat, melainkan harus menciptakan iklim usaha yang kompetitif sekaligus kooperatif antar sesama perusahaan lokal.

Di lain pihak perusahaan lokal tidak dapat bermanja dibuai oleh keunggulan komparatif sehingga lupa berbenah meningkatkan kemampuan diri untuk bersaing di pasar internasional. Pengembangan Industri harus menjadi sasaran pembangunan dari seluruh pemerintah baik di pusat maupun daerah, karena selain meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja secara signifikan, industri juga dapat membantu bangsa Indonesia meningkatkan kualitas SDM dalam rangka menghadapi persaingan global.

Bagian akhir dari Bab 12 menyinggung tentang konsep ekonomi kluster yang belakangan menjadi semakin populer dikembangkan dan diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Asia, dan termasuk juga Indonesia. Pada dasarnya strategi *clustering* yang dilakukan oleh negara-negara tersebut adalah bagian dari upaya melakukan revitalisasi struktur perekonomian wilayah lokal dalam rangka membangun perekonomian lokal yang memiliki kemampuan daya saing global. Penerapan strategi ekonomi kluster di Indonesia diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi

daerah sekaligus mengurangi kesenjangan ekonomi dan distribusi penduduk antar wilayah khususnya antara pulau Jawa dan luar Jawa. Selain itu kebijakan ini juga diharapkan dapat membantu perekonomian daerah dalam mempersiapkan diri menghadapi persaingan global yang semakin mendekat dan tak dapat dielakkan lagi.

Catatan

[1] Lihat Hoover EM, dan Giarratani F, (1987), *An Introduction to Regional Economics*, Chapter 1.

Bab 2

PENGERTIAN DASAR KEWILAYAHAN

2.1. Ilmu Kewilayahan yang Multi-Disiplin

Ilmu kewilayahan (*regional science*) merupakan cabang ilmu yang kegiatan analisisnya berlandaskan kepada pendekatan multi-disiplin. Professor Walter Isard, tokoh yang mempopulerkan ilmu kewilayahan sejak tahun 1940an, secara sederhana menyatakan ilmu ini sebagai *disiplin studi yang mendalami permasalahan sosial dalam dimensi kewilayahan atau dimensi keruangan, menggunakan berbagai kombinasi analisis dan riset empiris*[1]. Meskipun demikian, beliau sendiri mengakui kesulitan mendapatkan definisi yang tepat dan mampu menggambarkan cabang ilmu ini secara lengkap. Di dalam bukunya yang berjudul "*Introduction to Regional Science*", Professor Isard mendaftar paling tidak ada sekitar 13 (tigabelas) pengertian berbeda untuk menjelaskan ilmu kewilayahan[2], antara lain:

- kajian tentang wilayah atau sistem perwilayahan sebagai organisme dinamis
- sintesis atau analisis terpadu mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan psikologi yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah atau sistem perwilayahan
- kajian perkembangan masyarakat dalam konteks ruang dan waktu yang meliputi dimensi sosial, ekonomi, politik dan psikologi.
- kajian keragaman organisasi dan struktur kelembagaan masyarakat serta pengaruhnya terhadap perilaku masyarakat, distribusi spasial penduduk, dan kegiatan ekonomi.

- kajian analitis proses pembangunan pada ruang tertentu seperti daerah perkotaan, kabupaten, daerah aliran sungai (DAS), pulau dan sebagainya.
- kajian untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar dari organisasi spasial yang menentukan keseimbangan berkaitan dengan efisiensi, pemerataan dan kesejahteraan sosial.
- kajian sistem tempat, lokasi, kota, daerah perkotaan dan wilayah dunia; dan pola permukiman, industri dan kegiatan ekonomi, lapangan kerja, peningkatan pendapatan, penggunaan sumberdaya, dalam konteks lingkungan fisik.
- Sintesis dari seni perencanaan dan pengelolaan (manajemen) dengan ilmu pengetahuan tentang sistem spasial.

Jika diteliti lebih lanjut, kebanyakan definisi tersebut dibangun berdasarkan sudut pandang disiplin ilmu tertentu atau pendekatan analisis tertentu saja. Akibatnya definisi yang ditawarkan cenderung bersifat parsial dan kurang mampu menggambarkan pengertian ilmu kewilayahan secara lengkap dan utuh. Sifat pendekatan analisis ilmu kewilayahan yang multi-disiplin menjadi salah satu penyebab sulitnya membangun definisi yang efektif.

Terlepas dari kesulitan mendefinisikannya, satu hal yang jelas menjadi batasan bagi lingkup kajian ilmu kewilayahan adalah bahwa ranah analisisnya meliputi unsur ruang atau hal-hal yang berkaitan dengan ruang. Lokasi, jarak, luas, kondisi geografis, sumberdaya alam dan hal-hal lain yang berkaitan dengan karakter fisik ruang menjadi variabel yang berperan penting dalam ilmu kewilayahan. Namun, ilmu kewilayahan tidak hanya membahas faktor ruang sebagai topik studi yang statis, melainkan juga mempertimbangkan unsur manusia sebagai subjek pelaku dinamis yang melakukan kegiatan budidaya dan memanfaatkan ruang tersebut. Selain itu interaksi antara sesama manusia juga dianggap turut menentukan pola kegiatan pemanfaatan ruang. Dengan demikian maka interaksi antara manusia dengan ruang serta interaksi antara sesama manusia dalam memanfaatkan ruang menjadi topik analisis pokok dalam ilmu kewilayahan. Itulah sebabnya selain faktor-faktor fisik keruangan, lingkup analisis ilmu kewilayahan mencakup juga aspek ekonomi, sosial dan budaya.

Dengan demikian, apa pun sudut pandang atau pendekatan yang digunakan, serta apa pun teknik analisis yang diterapkan, pembahasan yang dilakukan oleh ilmu kewilayahan akan selalu berkaitan dengan unsur keruangan. Oleh sebab itu, untuk keperluan analisis, dibutuhkan suatu batasan cakupan ranah ruang. Dalam kaitan ini maka ilmu kewilayahan menggunakan wilayah (*region*) yang merupakan bagian tertentu dari ruang (*space*) sebagai entitas analisis. Sedangkan dalam melakukan kajian dan analisis, pendekatan yang dilakukan pada dasarnya banyak mengacu kepada teknik pendekatan yang sering dilakukan dalam cabang ilmu ekonomi, yakni: pengamatan empiris, analisis statistik, analisis ekonomi dan pendekatan uji eksperimental menggunakan simulasi model[3]. Sebagai contoh misalkan dalam teknik eksperimen sering digunakan konsep *ceteris paribus* yakni pengaruh atau dampak dari perubahan suatu faktor dianalisis dengan menganggap pengaruh dari faktor-faktor yang lain sebagai konstanta.

2.2. Pengertian dan Cakupan Wilayah

Secara umum wilayah dapat diartikan sebagai *suatu entitas ruang di muka bumi dengan luasan dan posisi yang tertentu*. Dalam konteks ilmu kewilayahan, **wilayah adalah satuan entitas ruang tertentu yang digunakan untuk keperluan analisis kewilayahan.**

Mengingat luasnya disiplin cabang keilmuan yang dapat diterapkan dalam analisis kewilayahan, maka ukuran entitas wilayah (luasan dan posisi) bisa saja berbeda antara suatu analisis dengan analisis yang lain. Studi atau kajian kondisi lokal sosial masyarakat misalnya seringkali dilakukan dengan cakupan lokasi sebatas tempat tinggal komunitas tertentu yang diamati. Sementara itu analisis ekonomi wilayah biasanya dilakukan dengan cakupan daerah yang lebih luas.

Untuk kasus-kasus di Indonesia, lingkup pembahasan ekonomi tingkat desa seringkali dianggap kurang memenuhi syarat sebagai satu entitas ekonomi yang solid. Akibatnya lingkup wilayah analisis sering diperluas mencakup tingkat administrasi yang lebih tinggi, seperti kecamatan (atau bahkan kabupaten); atau dapat juga mencakup gabungan beberapa desa yang berdekatan.

Dalam konteks pelayanan prasarana dan sarana fisik, selain kajian yang difokuskan kepada lingkup layanan lingkungan (*neighborhood*) ada pula kajian yang menekankan kepada lingkup layanan yang lebih luas yang disebut prasarana/sarana wilayah. Jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi komunitas, sarana pengumpul sampah komunitas (TPS – Tempat Pembuangan Sementara) dan sebagainya merupakan contoh dari prasarana/sarana lingkungan; sedangkan contoh prasarana/sarana wilayah antara lain adalah sistem jaringan jalan, sistem jaringan drainase, sistem DAS, sistem pengelolaan sampah kota, dan sebagainya. Dalam kenyataan sehari-hari sering kita lihat ketidaksinkronan antara sistem prasarana/sarana lokal dan sistem prasarana/sarana wilayah. Di kompleks-kompleks perumahan baru sering kita lihat sistem drainase yang dibangun secara lokal dan tidak disambungkan dengan peil sistem drainase wilayah. Akibatnya air buangan dari kompleks perumahan tersebut sering menimbulkan banjir dan genangan pada daerah sekitarnya.

Di Indonesia, data statistik yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada umumnya disajikan menurut satuan wilayah administratif mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Sehubungan dengan itu, beberapa analisis kewilayahan yang berkaitan dengan kebijakan publik pada umumnya mengacu juga kepada batas administrasi. Beberapa contoh analisis yang dilakukan mengikuti satuan wilayah administrasi antara lain adalah analisis kependudukan, analisis kondisi kemiskinan, dan analisis sarana pelayanan masyarakat (kesehatan, pendidikan dan sebagainya). Namun analisis kewilayahan yang berbasis daerah administrasi ini sukar diterapkan untuk melakukan kajian-kajian ekonomi, karena kegiatan ekonomi penduduk tidak dapat dibatasi secara kaku oleh batasan administrasi. Pekerja di DKI Jakarta misalnya banyak yang bertempat tinggal di daerah Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) yang berbeda wilayah administrasinya. Secara logika, analisis ekonomi kewilayahan akan lebih mudah diterapkan untuk satuan entitas pulau daripada satuan entitas daerah administrasi.

* Contoh lain dari kesulitan menerapkan batasan cakupan analisis adalah dalam kajian ekonomi wilayah perkotaan (urban) di mana kita seringkali dihadapkan kepada permasalahan batas wilayah analisis yang kurang jelas. Terminologi perkotaan lebih mencerminkan kata sifat dan

bukan kata benda sehingga sukar diberikan batas fisik yang jelas. Desa-desa di pinggiran kota misalnya, seringkali memiliki ciri-ciri kehidupan perkotaan yang lebih dominan, namun status administrasi mereka masih tetap saja disebut sebagai desa.

Dari ilustrasi di atas terlihat bahwa ukuran entitas wilayah atau batasan lingkup ruang dalam analisis kewilayahan akan sangat tergantung kepada sudut pandang pendekatan yang dilakukan. Secara umum, cakupan wilayah dalam analisis ilmu kewilayahan dapat bervariasi sebagai berikut:

Lokal dan regional (wilayah)

Lingkup wilayah lokal misalnya pada tingkat satuan wilayah komunitas. Contoh analisis kewilayahan lingkup lokal antara lain analisis sistem sanitasi lingkungan, analisis permukiman kumuh, hubungan ikatan sosial pada komunitas tertentu, pengembangan sumberdaya ekonomi lokal, dan sebagainya. Lingkup regional meliputi satuan wilayah yang lebih luas dan contoh analisisnya antara lain analisis ekonomi kabupaten, analisis tata guna lahan pada wilayah DAS, analisis wilayah pelayanan jaringan prasarana dasar (irigasi/jalan/ listrik dan sebagainya.

Menurut batas administrasi

Contoh-contoh lingkup wilayah menurut batas administrasi misalnya adalah satuan wilayah administrasi desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan daerah perbatasan. Jenis analisis yang biasa diterapkan pada lingkup wilayah ini antara lain adalah analisis kependudukan pada suatu kabupaten, analisis pelayanan publik di tingkat kecamatan (pendidikan atau kesehatan), analisis profil kemiskinan, analisis perekonomian kabupaten atau provinsi, dan sebagainya.

Menurut kondisi atau karakter geografi

Satuan entitas wilayah menurut karakter geografi dapat berupa satuan wilayah pulau, bentangan alam di kawasan pantai/pesisir, kawasan pedalaman, hamparan dataran rendah, pergunungan, dan sebagainya. Jenis analisis yang diterapkan misalnya analisis daya dukung lingkungan (luas lahan, kesesuaian lahan, kapasitas sumberdaya air, kerawanan

terhadap bencana, dan sebagainya), atau analisis aksesibilitas dan analisis hubungan ekonomi pada suatu bentangan alam tertentu.

Menurut karakter kegiatan sosial ekonomi

Pada kasus ini batas entitas wilayah ditetapkan menurut kriteria karakter sosial –ekonomi tertentu, misalnya analisis pola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah perkotaan (urban) dan di wilayah perdesaan.

Untuk mempermudah analisis kewilayahan, Hoover mencoba menyederhanakan pengertian lingkup ruang entitas wilayah dan membaginya menjadi dua jenis pendekatan: **homogen** dan **fungsional**[4]. Pada pendekatan homogen, lingkup ruang entitas wilayah ditetapkan berdasarkan faktor kesamaan atau keseragaman. Daerah pesisir pantai, bentangan atau hamparan daerah pertanian yang menghasilkan produk sejenis, permukiman masyarakat komunitas tertentu, permukiman kumuh, dan sebagainya merupakan contoh dari entitas wilayah yang homogen. Karakter wilayah diasumsikan homogen sehingga respons terhadap suatu intervensi atau input dari luar dianggap akan berdampak sama pada seluruh bagian dari wilayah tersebut.

Jenis pendekatan lain dalam menetapkan entitas wilayah menurut Hoover adalah berdasarkan integrasi fungsional. Dalam hal ini wilayah dipandang sebagai suatu kesatuan dari beberapa daerah yang memiliki hubungan interaksi yang lebih intensif dibandingkan dengan daerah lain (di luar wilayah). Hubungan interaksi yang terjadi bisa saja disebabkan oleh adanya saling ketergantungan secara ekonomi atau pun oleh sebab lain seperti aksesibilitas yang lebih mudah.

Salah satu pengembangan dari pendekatan wilayah fungsional adalah model simpul wilayah (*nodal region*). Pada model ini hubungan interaksi antara daerah di dalam suatu wilayah memperlihatkan adanya kecenderungan dominansi oleh satu daerah terhadap daerah yang lain. Wilayah kota metropolitan Jadebotabek (Jakarta-Depok-Bogor-Tangerang-Bekasi) merupakan contoh dari model simpul dengan posisi DKI Jakarta sebagai pusat simpul yang dominan. Interaksi antara sesama daerah di wilayah ini (*within-group interaction*) lebih kuat dibandingkan dengan interaksi daerah lain (*interaction between-groups*); sehingga Jadebotabek dapat dipandang sebagai satu entitas wilayah ekonomi. Konditi di pusat

konsentrasi bisnis di DKI Jakarta bisa saja berbeda sangat kontras dengan kondisi di daerah permukiman terutama yang terdapat di wilayah Bodetabek; namun kegiatan ekonomi mereka saling terintegrasi dan berkaitan erat dihubungkan oleh arus lalu lintas komuter, transaksi barang, jasa dan pembayaran.

Bervariasinya ukuran entitas wilayah menurut pendekatan yang diterapkan, mengakibatkan analisis kewilayahan membutuhkan metode analisis yang banyak menggunakan permodelan. Hal ini dapat dimengerti mengingat domain analisisnya banyak dipengaruhi oleh ilmu geografi, ilmu fisika dan ilmu ekonomi. Salah satu contoh dari upaya permodelan misalnya penyusunan model dalam rangka mencari penjelasan hubungan sebab-akibat dari beberapa fenomena di lapangan. Hubungan antara variabel bebas (faktor penyebab) dan variabel tidak bebas (faktor akibat) didekati dengan cara menerapkan beberapa asumsi tertentu. Selanjutnya, cakupan entitas wilayah sebagai domain dari variabel tidak bebas tersebut dikembangkan sesuai dengan karakteristik hubungan yang diasumsikan.

2.3. Ekonomi Kewilayahan

Studi ekonomi regional atau ekonomi kewilayahan dapat dipandang sebagai **upaya untuk memahami karakter keruangan dari sistem ekonomi**. Menurut Hoover pengertian ekonomi kewilayahan dapat disimpulkan dalam beberapa pertanyaan: *Apa di mana, dan mengapa serta lantas apa?* (*"What is where, and why- and so what?"*)[5]. Pertanyaan "apa" berlaku terhadap seluruh kegiatan ekonomi, bukan hanya kegiatan produksi dalam arti sempit seperti pabrik, perkebunan, dan pertambangan, tetapi juga kegiatan ekonomi lainnya yang meliputi seluruh pemangku kepentingan (stake holders) mulai dari rumah tangga, komunitas masyarakat, swasta dan lembaga pemerintahan. Pertanyaan "di mana" berlaku terhadap lokasi dalam kaitan dengan kegiatan ekonomi lainnya; termasuk dalam hal ini pertanyaan tentang proximity, konsentrasi, penyebaran, dan kemiripan atau keanekaragaman kegiatan. Lingkup pembahasannya dapat bervariasi baik dalam kerangka yang luas antar wilayah, maupun dalam kerangka yang sempit seperti

zona kawasan, lingkungan dan lokasi setempat. Selanjutnya pertanyaan "mengapa" dan "lantas apa" berkaitan dengan batas-batas elastik dari analisis kompetensi ekonomi serta langkah kebijakan untuk melakukan rencana tindak lanjut (*action plan*).

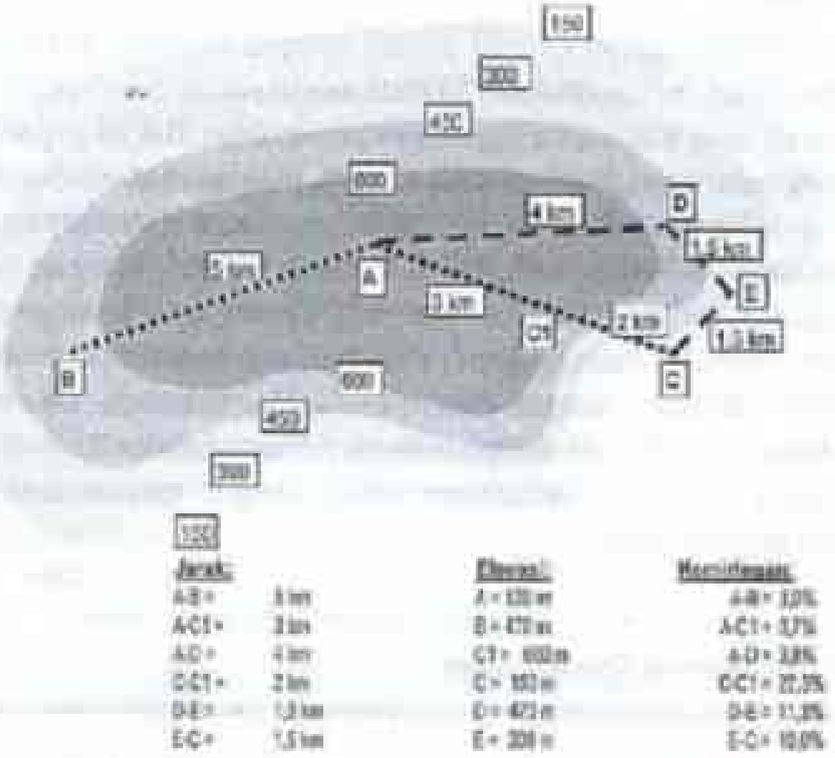

Gambar 2.1. Contoh Peta Lokasi Simpul Kegiatan

Sebagaimana sudah disebutkan di muka, ruang merupakan unsur ranah yang penting dalam analisis ekonomi kewilayahan. Untuk itu maka pengetahuan akan hal-hal yang berkaitan dengan analisis ruang merupakan salah satu prasyarat yang perlu dikuasai. Gambar 2.1 misalnya memperlihatkan contoh peta sebagai model yang sering digunakan untuk menggambarkan ruang dalam bentuk dua dimensi. Pada gambar tersebut terlihat jarak lurus dari A ke B sama dengan jarak dari A – C1- C, yakni 5 km. Jika kondisi geografis lokasi diabaikan atau daerah tersebut dianggap datar, maka biaya transportasi dari A ke B dan dari A ke C tidaklah berbeda.

Namun, dari gambar peta tersebut terlihat lintasan garis lurus dari titik C1 (elevasi 600 m) ke C (elevasi 150 m) jauh lebih curam

dibandingkan dengan kemiringan rata-rata dari titik A (elevasi 620 m) ke B (elevasi 470 m). Kemiringan rata-rata segmen C – C1 adalah 22,5% sedangkan kemiringan rata-rata AB adalah 3,0%. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap biaya transportasi per satuan jarak mengingat jalan yang mendaki membutuhkan lebih banyak tenaga atau bahan bakar. Dengan demikian ongkos angkutan per satuan kilometer dari C ke C1 akan menjadi lebih mahal dibandingkan dengan dari B ke A.

Selanjutnya, lintasan jalan lurus dari A ke C ternyata tidak dapat atau tidak mungkin dibangun karena terlalu curam sehingga berbahaya bagi kendaraan berat yang melaluinya. Sebagai alternatifnya maka lintasan yang lebih optimal adalah melalui A-D-E-C, namun akibatnya jarak tempuh total dari A ke C kini menjadi lebih jauh, yakni 7 km. Dampak dari hal ini, meskipun biaya angkutan per satuan kilometernya sama dengan pada lintasan A – B, namun total biaya transportasi A – D – E – C tetap akan lebih tinggi karena jarak tempuh totalnya lebih besar.

Contoh di atas memperlihatkan bagaimana analisis ekonomi kewilayahan diterapkan dengan menggunakan peta sebagai model bidang dua dimensi yang menggambarkan ruang tiga dimensi. Dalam banyak kasus, media peta merupakan salah satu alat analisis dalam ilmu kewilayahan yang cukup vital dan sering digunakan untuk berbagai keperluan seperti menggambarkan deskripsi wilayah, analisis, dan untuk kebutuhan perencanaan.

2.4. Tiga Fondasi Ekonomi Kewilayahan menurut Hoover & Giarratani

Menurut Hoover dan Giarratani paling tidak ada tiga hal pokok (*foundation stones*) yang melandasi pengetahuan tentang kewilayahan dan analisis kewilayahan, yakni: ketidak-mobilitasan faktor produksi (*immobility of factor production*), sifat faktor produksi dan barang yang tidak dapat dibagi sempurna (*imperfect divisibility of production factor and goods*), serta ketidaksempurnaan mobilitas barang dan jasa (*imperfect mobility of goods and services*)[6]. Ketiga fondasi tersebut merupakan faktor-faktor yang melandasi pola lokasi kegiatan ekonomi serta mendasari sebagian besar permasalahan dalam analisis ekonomi

kewilayahan. Fondasi atau hal pokok pertama dan ketiga berkaitan dengan aspek pergerakan atau mobilitas yang mencakup karakter lokasi dan aksesibilitas. Sedangkan fondasi kedua berkaitan dengan hubungan antar industri dalam konteks spasial/lokasi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, fondasi pertama berkaitan dengan keunggulan lokasi dalam hal sumberdaya alam; fondasi kedua berkaitan dengan konsentrasi ekonomi secara spasial; sedangkan fondasi ketiga berkaitan dengan biaya pemindahan/ pengangkutan dan komunikasi.

***Mobilitas tidak sempurna dari faktor produksi* - Keunggulan komparatif alamiah lokasi dan lokasi sumberdaya alam yang tidak dapat dipindahkan**

Immobilitas faktor dasar produksi, baik secara parsial maupun keseluruhan merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya perbedaan karakter antara lokasi satu dengan lokasi lain. Daerah Cipanas Puncak misalnya banyak menghasilkan berbagai jenis sayuran untuk dipasok ke Jakarta karena ketinggian lokasi dan iklimnya cocok untuk jenis tanaman tersebut. Begitu pula, sebagian besar lahan di Jawa dapat ditanami padi sedangkan di Kalimantan lahan gambutnya sukar ditanami padi. Dalam hal ini, iklim dan ketinggian Cipanas tidak dapat dipindahkan ke Jakarta. Begitu pula tanah pertanian yang ada di Jawa tidak dapat atau sukar dipindahkan ke Kalimantan, sehingga kegiatan pertanian di masing-masing lokasi juga sukar dipindahkan. Dengan kata lain, kondisi alamiah lokasi seringkali menentukan jenis kegiatan usaha dan karakter ekonomi masyarakat setempat.

Satu lokasi dapat berbeda dengan lokasi lainnya dalam hal kekayaan sumberdaya alam yang dimilikinya. Negara-negara Timur Tengah misalnya memiliki sumberdaya minyak bumi yang berlimpah sedangkan Jepang tidak mempunyai sumber tersebut. Di lain pihak Indonesia dan Brazil memiliki potensi hasil hutan tropis, sedangkan Selandia Baru dan Afrika Selatan tidak. Kelebihan yang dimiliki suatu lokasi akibat adanya sumberdaya alam tersebut sering disebut sebagai faktor keunggulan komparatif lokasi (*location comparative advantage*).

Pada masa Orde Baru pemerintah Indonesia melakukan upaya menarik investor asing dengan cara menawarkan tenaga kerja murah. Pada saat itu upah tenaga kerja Indonesia relatif lebih murah dibanding-

kan dengan negara ASEAN lainnya, sehingga hal ini menjadi keunggulan komparatif Indonesia. Namun setelah Cina dan Vietnam masuk ke pasar global, mereka mampu menawarkan upah tenaga kerja yang lebih murah daripada tenaga kerja Indonesia. Akibatnya Indonesia kini tidak lagi menarik sebagai daerah tujuan investasi, bahkan beberapa industri yang sudah beroperasi hengkang dari Indonesia dan melakukan relokasi ke Vietnam dan China.

***Faktor proses produksi dan barang tidak dapat dipisahkan sempurna*– Konsentrasi ekonomi spasial**

Terkadang suatu kegiatan ekonomi tidak dapat dilaksanakan secara individual atau parsial karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses suatu sistem kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Akibatnya sistem dan proses kegiatan ekonomi tersebut harus dilaksanakan secara terintegrasi di suatu lokasi. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan konsentrasi ekonomi spasial pada jenis-jenis industri tertentu.

Keunggulan sumberdaya alam yang dimiliki suatu lokasi dalam batas tertentu dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa terjadi kecenderungan industri berkumpul di lokasi tersebut. Penghematan biaya akibat kedekatan lokasi ke sumberdaya/input merupakan salah satu faktor atau alasan utama untuk menjelaskan fenomena konsentrasi spasial kegiatan ekonomi atau aglomerasi ekonomi sebagaimana diperkenalkan oleh Weber (1929). Kegiatan industri di kota Bontang yang berintikan industri pupuk Kalimantan Timur yang ditunjang oleh industri-industri turunannya (seperti industri melamin, dan sebagainya) merupakan contoh dari konsentrasi industri spasial model Weber ini.

Namun keunggulan sumberdaya (alam) bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan terbentuk dan berkumpulnya kegiatan ekonomi di suatu lokasi. Di beberapa kasus bisa saja konsentrasi spasial industri terjadi akibat faktor-faktor lain. Salah satu faktor yang dianggap cukup signifikan menentukan terjadinya konsentrasi spasial industri adalah skala ekonomi dari suatu kegiatan industri. Skala ekonomi yang besar cenderung menciptakan daya tarik lebih besar bagi kegiatan industri lain yang berkaitan untuk mendekatkan diri. Efisiensi biaya

yang terjadi, baik pada tahap proses produksi maupun pada tahap pemasaran, merupakan faktor pokok yang meningkatkan daya tarik lokasi sehingga industri lain tertarik untuk berkumpul dan membentuk aglomerasi di lokasi tersebut.

Di dunia industri, kondisi persaingan pasar yang relatif cukup ketat mendorong perusahaan untuk menjadi semakin efisien dan cenderung mengembangkan spesialisasi[7]. Namun, pembentukan spesialisasi dalam kegiatan industri di lain pihak menimbulkan situasi saling ketergantungan antar perusahaan dalam satu rantai industri yang sejenis. Hal ini mendorong terciptanya kecenderungan bagi industri-industri spesialis yang saling tergantung tersebut untuk saling mendekatkan diri yang kemudian membentuk aglomerasi atau terkonsentrasinya kegiatan di satu lokasi. Selanjutnya eksistensi dari aglomerasi tersebut akan tergantung kepada skala ekonomi yang terbentuk di lokasi tersebut. Semakin besar skala ekonomi yang terbentuk semakin besar daya tariknya terhadap industri (kecil) yang terkait. Faktor skala ekonomi ini merupakan fondasi kedua ekonomi kewilayahan; Hoover dan Giarratani menyebutkan fondasi kedua ini sebagai *imperfect divisibility* dari faktor produksi, barang dan jasa.

Fondasi yang kedua ini membawa kita kepada pertanyaan mengapa satu lokasi cenderung lebih memiliki daya tarik bagi kegiatan ekonomi tertentu dibandingkan dengan lokasi lain. Atau dalam kalimat lain faktor apa yang mempengaruhi keputusan suatu industri untuk memilih lokasi tertentu dibandingkan dengan lokasi yang lain.

Mobilitas barang dan jasa yang tidak sempurna – Biaya Pemindahan/pengangkutan barang dan jasa

Berbeda dengan sumberdaya alam yang lokasinya sudah tertentu dan tidak bisa dipindahkan, produk barang dan jasa relatif lebih mudah dipindahkan. Namun, meskipun barang dan jasa dapat dipindah-pindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain, upaya untuk memindahkan tersebut mempersyaratkan adanya biaya pemindahan atau *transfer cost*. Hoover dan Giarratani menyebutkan hal ini sebagai faktor yang disebabkan oleh mobilitas barang dan jasa yang tidak sempurna dan merupakan fondasi ketiga dalam ekonomi kewilayahan.

Secara teknis biaya transfer pada umumnya didominasi oleh biaya transportasi. Dalam beberapa kasus biaya transportasi bahkan seringkali menjadi faktor yang paling menentukan terhadap strategi lokasi usaha. Hal ini menjelaskan mengapa lokasi, jarak dan aksesibilitas menjadi faktor-faktor yang memegang peranan penting dalam analisis ekonomi kewilayahan.

Meskipun biaya transportasi secara teknis merupakan komponen yang paling dominan dalam biaya transfer, namun tak jarang pula kita temukan komponen-komponen biaya non teknis yang turut berpengaruh terhadap biaya transfer secara keseluruhan. Ongkos birokrasi, "uang siluman", pungutan liar dan sebagainya sering disebut-sebut sebagai komponen biaya yang turut mempengaruhi biaya transfer. Bahkan dalam banyak kasus, besaran komponen biaya non teknis ini dapat melebihi biaya transportasi sehingga berdampak kepada tingginya harga jual produk di tingkat konsumen. Celakanya, para pelaku yang menciptakan ekonomi biaya tinggi ini tidak pernah peduli terhadap dampak yang terjadi seperti semakin mahalnya harga-harga barang di pasar domestik dan menurunnya daya saing barang produk nasional di pasar internasional.

Fenomena ekonomi biaya tinggi sering dituding sebagai salah satu penyebab rendahnya minat investor untuk datang ke suatu negara/lokasi. Bagi para investor, kondisi pasar global saat ini menuntut persaingan yang ketat baik dari segi harga produk maupun kualitas barang yang dihasilkan. Hal ini tentunya mendorong investor untuk dapat melakukan efisiensi melalui upaya menekan biaya input (terutama bahan baku dan tenaga kerja) dan menekan biaya proses produksi serendah mungkin. Dalam kaitan efisiensi ini, beban "pungutan atau retribusi liar" yang terlalu tinggi akan sangat menggangu upaya penciptaan proses produksi yang efisien. Upaya keras pihak industri untuk melakukan kegiatan proses produksi dengan sangat efisien akan menjadi sia-sia karena harga jual di tingkat konsumen tetap akan tinggi akibat adanya beban biaya non teknis tersebut. Jika kondisi usaha yang dihadapi investor sudah sedemikian beratnya untuk mendapatkan margin keuntungan, maka tentunya investor akan lebih suka menutup usahanya dan atau pindah ke lokasi lain yang lebih mendukung upaya efisiensi.

2.5. Konsepsi dan Permodelan

Seperti umumnya ditemui dalam disiplin ilmu ekonomi dan fisika, ekonomi kewilayahan banyak menggunakan pendekatan permodelan sebagai alat analisis. Model-model analisis yang digunakan pada umumnya dikembangkan dari suatu konsepsi tertentu yang menerapkan kondisi-kondisi tertentu sebagai asumsi dasar. Sebagai contoh misalnya pendekatan entitas kewilayahan yang menurut Hoover dapat dibagi menjadi pendekatan homogen dan fungsional (lihat Bagian 2.2). Pada pendekatan homogen, suatu entitas wilayah diasumsikan memiliki karakter tertentu yang sama, sehingga input atau intervensi terhadap wilayah tersebut dianggap akan menimbulkan dampak yang relatif sama pula kepada seluruh daerah di dalam wilayah itu. Pada pendekatan fungsional, suatu entitas wilayah dianggap memiliki hubungan interaksi ekonomi internal yang cukup solid, dan dalam beberapa kasus hubungan antar daerah di dalam entitas wilayah (*within region*) dimodelkan sebagai hubungan antara inti (*nucleus*) dan daerah *periphery*-nya. Sedangkan hubungan antar entitas wilayah (*between region*) dapat digambarkan dalam bentuk hubungan tarik menarik antar simpul pusat pertumbuhan.

Permodelan yang dilakukan dalam analisis ekonomi kewilayahan dapat bervariasi sesuai dengan sudut pandang pendekatan yang dilakukan. Model agregasi ekonomi suatu wilayah misalnya sering dinyatakan dalam bentuk variabel produk domestik regional bruto (PDRB). Dalam hal ini kegiatan ekonomi di suatu wilayah diasumsikan merupakan suatu entitas ekonomi yang strukturnya dibangun oleh beberapa agregat sektor. Model ini merupakan replikasi dari model pendekatan ekonomi makro. Pada model ini, kondisi relatif dari perekonomian suatu entitas wilayah ditunjukkan oleh kinerja PDRBnya; sedangkan struktur internal ekonomi entitas wilayah tersebut ditunjukkan oleh hubungan antar sektor dalam PDRB. Dari konteks spasial, model ini memiliki kelemahan karena tidak dapat menggambarkan hubungan internal antar daerah dalam suatu wilayah (*spatial interaction within region*); meskipun demikian model ini dapat dikembangkan untuk analisis hubungan keterkaitan antar sektor-antar wilayah (*inter-regional sectoral linkages*).

Model lain yang juga sering digunakan adalah model pendekatan simpul. Hampir sama dengan model agregasi, perekonomian suatu wilayah dalam model ini diasumsikan diwakili oleh suatu besaran agregasi. Perbedaannya, selain menunjukkan volume produk atau transaksi ekonomi, besaran agregasi juga menunjukkan sifat spasial. Besaran agregasi di suatu simpul ekonomi juga diasumsikan menunjukkan derajat konsentrasi ekonomi yang sekaligus merupakan potensi ekonomi sehingga simpul lebih dipandang sebagai satu pusat kegiatan atau pusat pertumbuhan yang memiliki daya tarik dan daya sebar terhadap lingkungan sekitarnya. Model ini merupakan adopsi dari model fisika yang berhubungan dengan potensi dan gaya tarik suatu massa. Dalam konteks internal wilayah, hubungan antar daerah dalam satu entitas wilayah dimodelkan seperti sebuah unsur atom yang memiliki daerah inti dan daerah-daerah di luar inti sebagai penunjangnya; sedangkan hubungan antar entitas wilayah dimodelkan sebagai hubungan tarik menarik antar simpul (nodal) pusat pertumbuhan. Komposisi wilayah mungkin saja terdiri atas satu inti didukung oleh beberapa sub-pusat dengan spesialisasi produk yang berbeda namun saling melengkapi. Kondisi saling bergantung dan saling melengkapi ini kemudian terintegrasi sehingga membentuk satu kekuatan ekonomi wilayah. Sementara itu, pada beberapa model analisis, hubungan antar simpul pusat pertumbuhan dicoba disusun secara hirarkis dengan cara memperbandingkan tingkat skala pemusatan dari masing-masing entitas wilayah.

Perbedaan pendekatan antara wilayah homogen dan wilayah fungsional berpengaruh terhadap model analisis ekonomi spasial yang dikembangkan. Pada pendekatan wilayah homogen, produk ekspor menjadi basis utama dalam analisis. Surplus produksi yang dihasilkan suatu wilayah dianggap sebagai produk ekspor yang menentukan kinerja perekonomian wilayah tersebut; sementara itu hubungan perdagangan antar daerah dalam wilayah menjadi tidak terlalu penting karena keseluruhan wilayah dianggap homogen. Pembahasan lebih lanjut mengenai model ekonomi basis ini dapat dilihat pada Bab 9. Sementara itu, pada pendekatan fungsional, berlaku hal sebaliknya. Hubungan transaksi internal barang dan jasa antara daerah-daerah di dalam wilayah justru dianggap memegang peranan yang sangat penting dalam membangun struktur ekonomi wilayah. Model yang

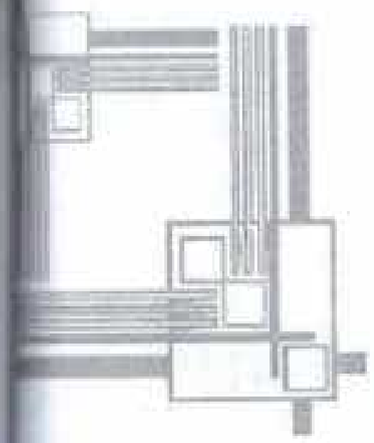

BAGIAN KELIMA:

AGENDA PENGEMBANGAN MENDATANG

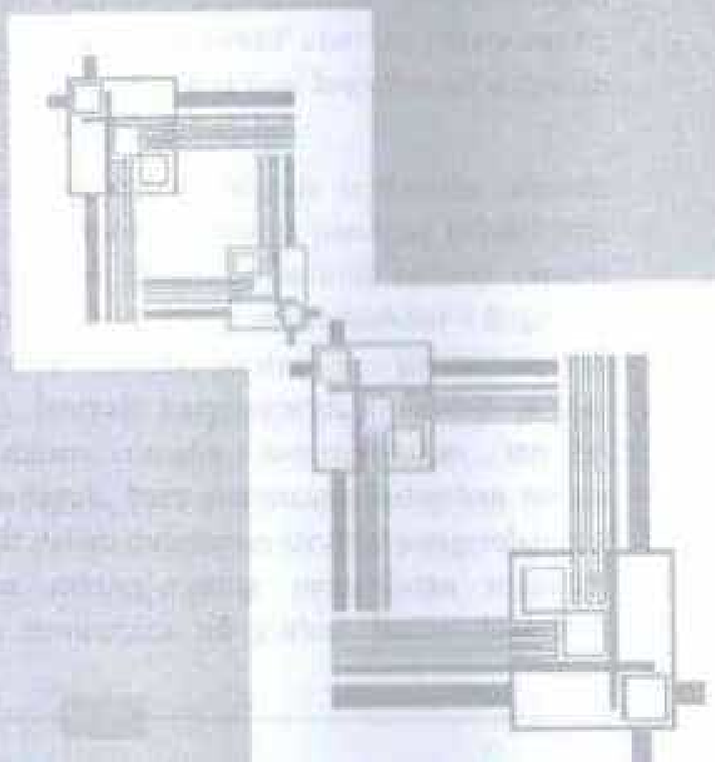

Bab 12

PENGEMBANGAN TOPIK BAHASAN

Bab ini memuat beberapa catatan penutup sebagai bahan bagi agenda pengembangan lebih lanjut ke masa depan. Bab-bab terdahulu sudah mengupas beberapa perspektif yang sering diterapkan dalam melakukan kajian ekonomi kewilayahan. Lingkup pembahasan yang dilakukan pada umumnya mencakup pemahaman dasar terhadap struktur (internal) ekonomi wilayah, hubungan keterkaitan ekonomi antarwilayah, dan hubungan-hubungan yang mungkin terjadi antara lokasi dengan industri. Pembahasan yang berkaitan dengan aspek perspektif perencanaan tidak banyak disinggung di sini karena memang isi buku ini lebih banyak dimaksudkan untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan mengenai ekonomi kewilayahan. Meskipun demikian beberapa contoh aplikasi yang disajikan dalam buku ini ada yang sudah masuk ke dalam ranah perencanaan dan dapat dijadikan sebagai masukan awal bagi kegiatan perencanaan pengembangan ekonomi wilayah. Berkaitan dengan perspektif analisis perencanaan, beberapa kemampuan dasar sebagai prasyarat bagi kegiatan perencanaan menjadi salah satu catatan penutup dalam bab ini.

Sebagaimana sudah disinggung di bagian terdahulu, analisis ekonomi kewilayahan mencakup berbagai sudut pandang pendekatan sehingga seringkali kita dapatkan kondisi dikotomi konsep seperti konvergensi spesialisasi usaha – diversifikasi usaha, kohesif - dispersif, konsentrasi spasial - penyebaran spasial, perdesaan - perkotaan, dan sebagainya. Hal ini sedikit banyak berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan dalam rangka merencanakan strategi pengembangan (ekonomi) wilayah. Para perencana kebijakan sering menghadapi pilihan yang sulit dalam menyusun strategi pengembangan (ekonomi) wilayah, karena masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan. Sementara itu pilihan harus dilakukan

karena situasi yang dihadapi seringkali merupakan kondisi "pareto optimum" atau "zero sum game". Dalam kaitan ini, dilema strategi pembangunan sektor industri dan kebutuhan akan pendapatan ekspor juga menjadi salah satu catatan penutup dalam bab ini.

Terakhir, kecenderungan perkembangan perekonomian dunia yang semakin mengarah kepada globalisasi dan liberalisasi perdagangan antar negara mau tidak mau akan sangat berpengaruh terhadap eksistensi perekonomian lokal/wilayah. Kondisi ini secara perlahan-lahan tetapi pasti akan membawa isu persaingan global, tidak hanya ke tingkat perekonomian nasional, namun juga hingga ke tingkat perekonomian lokal/wilayah. Dengan demikian strategi pengembangan perekonomian wilayah tidak hanya memperhitungkan kemungkinan persaingan dari wilayah lain, namun juga harus mengantisipasi kemungkinan ancaman dari pesaing global. Untuk itu beberapa isu dirasakan cukup penting untuk dikemukakan sebagai bahan bagi agenda pembahasan lebih lanjut.

12.1. Perspektif Perencanaan

Berkaitan dengan perspektif perencanaan, beberapa konsep dasar pengetahuan dan pendekatan analisis serta keterampilan dasar analisis perlu lebih dikuasai agar dapat menghasilkan perencanaan yang optimal dan memenuhi kriteria pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal ini beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain (lihat juga teks pada bagian akhir dari Subbab 2.6):

- perlunya pengetahuan akan analisis yang bersifat peramalan ke masa depan (proyeksi, estimasi dan sebagainya). Alat analisis dapat berupa regresi linear, regresi non linear, fungsi kepangkatan, dan sebagainya.
- perlunya pengetahuan mengenai berbagai konsep pendekatan analisis serta dasar-dasar proses hubungan antar elemen dalam ekonomi kewilayahan. Sebagian besar materi tersebut sudah dimuat dalam buku ini. Keterampilan analisis yang dibutuhkan antara lain analisis linear *progromming*, matriks, analisis program dinamis, dan sebagainya.

- kegiatan perencanaan pada umumnya berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang melibatkan banyak aspek (baik kualitatif maupun kuantitatif), sehingga membutuhkan kemampuan analisis yang berkaitan dengan aspek multikriteria; kemampuan analisis optimasi; kemampuan analisis kategorisasi dan klustering masalah/isu/kegiatan; kemampuan analisis penyusunan hirarki permasalahan/isu/kegiatan; serta kemampuan pengambilan keputusan menggunakan alat-alat analisis tersebut. Lemahnya penguasaan atas hal-hal di atas tentunya akan berpengaruh terhadap rekomendasi perencanaan yang dihasilkan.
- selain kemampuan teknis dan pengetahuan yang memadai, ranah perencanaan juga membutuhkan kemampuan visioner dalam arti kemampuan membayangkan kemungkinan-kemungkinan perubahan serta dampak dan implikasinya di masa yang akan datang. Kemampuan visioner ini tidak hanya menyangkut aspek kuantitatif namun juga berhubungan dengan aspek kualitatif serta berkaitan dengan aspek keruangan. Sebagai contoh seorang perencana pengembangan wilayah yang baik seharusnya dapat dengan cepat membayangkan dampak dan implikasi yang terjadi jika suatu kawasan bertumbuh dalam waktu 10 tahun dari tingkat kepadatan penduduk 50 jiwa/hektar menjadi 300 jiwa/ hektar. Jika sang perencana tidak memiliki kemampuan tersebut, maka ia tidak akan mungkin dapat merekomendasikan kebijakan strategis dan tindakan optimal yang harus ditempuh.

12.2. Dilema Membangun Struktur Industri yang Kuat dan Meningkatkan Hasil Ekspor yang Cepat

Pembahasan konsep ekonomi basis menyarankan kepada kita pentingnya peningkatan pendapatan ekspor sebagai faktor awal untuk menggerakkan perekonomian suatu wilayah. Namun, selain faktor penggerak awal, tingkat output perekonomian suatu wilayah juga ditentukan oleh hubungan internal antar sektor (basis dan non basis) yang menciptakan mekanisme pengganda terhadap faktor penggerak awal tersebut. Perekonomian yang memiliki pendapatan ekspor tinggi

tetapi nilai pengganda rendah akan menghasilkan total output yang tidak jauh berbeda dengan besaran nilai pendapatan ekspor. Sebaliknya, perekonomian yang memiliki nilai pengganda tinggi tetapi nilai pendapatan ekspornya rendah juga memberikan total output yang relatif rendah. Dengan demikian kondisi ideal yang diharapkan oleh suatu perekonomian wilayah adalah bagaimana menciptakan ekspor setinggi mungkin serta sekaligus menciptakan nilai pengganda yang tinggi melalui mekanisme rantai produksi yang banyak menghasilkan nilai tambah. Atau dengan kata lain bagaimana menciptakan rantai nilai tambah produksi yang terdiversifikasi yang masing-masingnya memiliki potensi ekspor.

Proses penciptaan rantai nilai tambah produksi yang terdiversifikasi pada umumnya merupakan kegiatan dari sektor industri pengolahan dan jasa. Sektor industri pengolahan dapat berperan sebagai sektor basis penghasil ekspor sedangkan sektor jasa sebagai sektor non-basis. Dalam hal ini kondisi di negara berkembang pada umumnya menghadapi kendala kapasitas teknologi dan sumberdaya manusia yang relatif rendah sehingga kemampuan menciptakan pengganda ekonomi melalui kegiatan sektor industri relatif juga masih rendah. Sebagai akibatnya sering terjadi suatu perekonomian melakukan kegiatan ekspor bahan mentah dalam skala besar demi untuk mendapatkan pendapatan ekspor yang cepat. Hal ini menimbulkan dilema antara kebutuhan taktis jangka pendek untuk meningkatkan pendapatan hasil ekspor secara cepat dengan kebutuhan strategis jangka panjang untuk mengembangkan industri yang berdaya saing tinggi.

Indonesia sebagai negara berkembang yang kaya akan bahan baku banyak menghadapi dilema di atas. Sinergi antara sistem produksi bahan baku dan sistem industri nasional pada umumnya belum terbentuk dengan baik sehingga banyak menimbulkan titik-titik yang rawan bagi terjadinya konflik internal antara berbagai pemangku kepentingan. Konflik seperti ini bila dibiarkan berkepanjangan dapat merugikan Indonesia dan di lain pihak malah semakin menguntungkan negara pesaing.

Berikut disampaikan ilustrasi dari beberapa komoditas produk Indonesia yang mengalami dilema di atas.

Kasus 1: Kakao

Salah satu contoh yang sering dibahas di berbagai forum adalah permasalahan komoditas kakao di Indonesia. Kakao merupakan salah satu komoditas dunia yang cukup populer. Pada pertengahan dekade 2000, Indonesia merupakan negara produsen biji kakao terbesar ketiga di dunia sesudah Pantai Gading dan Ghana[1]. Majoritas dari produk biji kakao Indonesia dihasilkan di pulau Sulawesi. Kondisi ini membuat kakao menjadi salah satu komoditas ekspor utama yang mendatangkan devisa bagi beberapa provinsi di Sulawesi (Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara). Sayangnya, komoditas ini memiliki nilai pengganda yang tidak terlalu besar, karena hampir seluruh produk ekspornya merupakan biji kakao yang menjadi bahan baku bagi industri hilir di luar negeri. Hanya sedikit produk biji kakao lokal yang diolah oleh industri lokal (terutama industri makanan) untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi. Posisi Indonesia sebagai produsen biji kakao dunia dan konsumen bahan kakao giling dapat dilihat pada Gambar 12.1 dan Gambar 12.2.

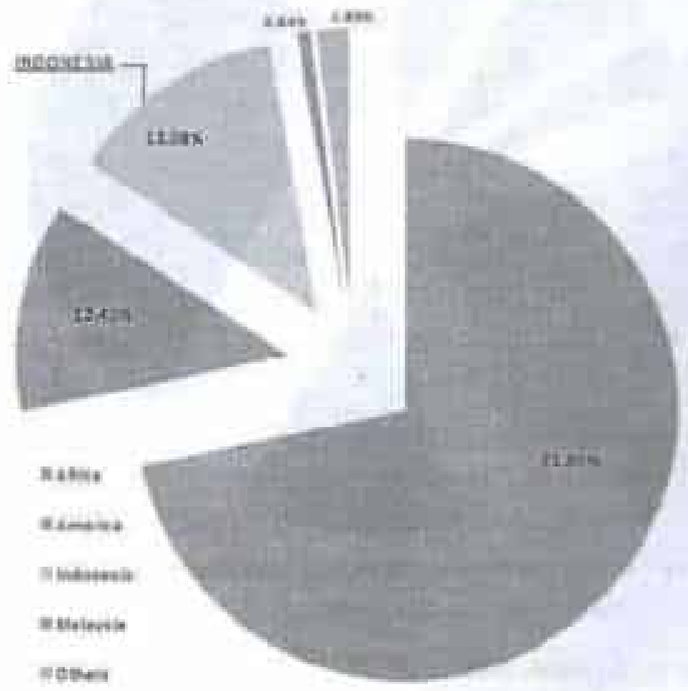

Sumber: Data ICCO Annual Report 2005/2006

Gambar 12.1. Porsi Produksi Biji Kakao Dunia 2005/2006 (000 ton)

Upaya pemerintah untuk mendorong pengembangan industri hilir bagi produk kakao lokal kelihatannya tidak terlalu sukses. Tidak banyak industri turunan kakao baik internasional maupun lokal yang tertarik untuk bergerak pada rantai industri kakao di Indonesia. Negara Malaysia yang langka bahan baku bahkan memiliki lebih banyak industri pengolahan kakao. Hal ini dapat kita lihat dari data produksi biji kakao dan konsumsi hasil olahan awal giling biji kakao untuk kedua negara. Pada tahun 2005/2006 misalnya, produksi biji kakao Indonesia sebesar 470 ribu ton sedangkan Malaysia 30 ribu ton. Namun dalam hal konsumsi biji kakao konsumsi Indonesia hanya sebesar 120 ribu ton, sedangkan tingkat konsumsi Malaysia mencapai 250 ribu ton[2]. Produk biji coklat giling merupakan bahan baku bagi kegiatan industri turunan kakao. Hal ini menunjukkan kegiatan industri pengolahan coklat di Malaysia lebih besar daripada Indonesia (lihat Gambar 12.2).

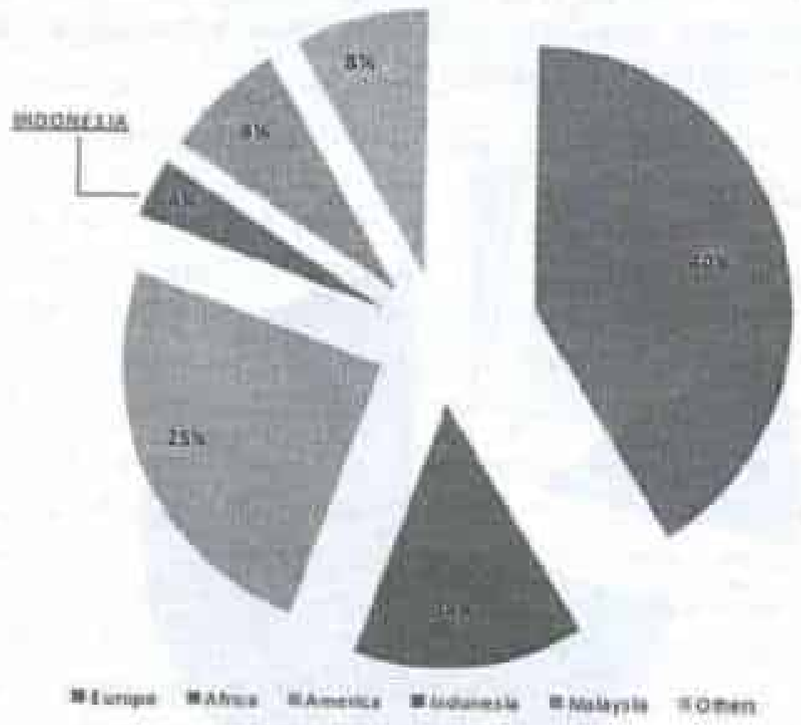

Sumber: Data ICCO Annual Report 2005/2006

Gambar 12.2. Porsi Konsumsi Produk Giling Kakao Dunia 2005/2006 (000 ton)

Di sisi petani sendiri, budi daya dan produksi biji kakao cenderung konservatif dan tidak banyak upaya untuk melakukan inovasi. Sebagai contoh misalnya biji kakao yang diproduksi petani pada umumnya jarang difermentasi, padahal biji kakao yang difermentasi diminati oleh pasar Eropa karena memiliki aroma yang lebih baik. Alasan dari pihak petani adalah bahwa proses fermentasi membutuhkan waktu dan biaya tambahan, sedangkan harga pembelian biji kakao biasa dan biji kakao fermentasi oleh pedagang pengumpul tidak banyak berbeda. Sebagai informasi tambahan, sifat biji kakao Indonesia memiliki titik leleh yang relatif lebih tinggi sehingga diminati oleh industri konfeksioneri kakao sebagai bahan pencampur untuk meningkatkan titik leleh produk makanan berbasis kakao. Selain itu, produksi biji kakao Indonesia sebagian besar berasal dari produk budidaya petani skala rumah tangga.

Kondisi di atas menunjukkan dilema yang dihadapi Indonesia dalam upaya mengembangkan industri kakao. Di satu sisi, sebagian besar biji kakao yang diekspor mendatangkan pendapatan yang cukup besar bagi petani sekaligus sebagai input pendapatan ekonomi basis bagi wilayah yang bersangkutan. Namun di lain pihak Indonesia juga perlu mengembangkan industri turunan kakao untuk meningkatkan nilai tambah dan penggandanya serta membuka lebih banyak lapangan kerja.

Kasus 2: Rotan

Contoh lain adalah komoditas rotan Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil bahan rotan yang sangat besar di dunia. Beberapa tahun belakangan ini terjadi polemik mengenai kebijakan ekspor bahan rotan asalan dari Indonesia. Pada tahun 2004 pemerintah Indonesia melarang ekspor bahan rotan asalan. Hal ini menimbulkan protes di beberapa daerah penghasil bahan baku rotan di Sulawesi dan Kalimantan. Bagi daerah tersebut, larangan ini mengurangi peluang daerah untuk meningkatkan pendapatan dari bagi hasil produk sektor kehutanan. Kemudian setelah pergantian pemerintahan, pada tahun 2005 larangan tersebut dicabut dan ekspor bahan asalan rotan diperbolehkan. Kini giliran pihak asosiasi pengusaha mebel dan kerajinan rotan yang melakukan protes. Mereka beralasan bahwa akibat banyaknya rotan asalan yang diekspor, bahan baku produksi cenderung menjadi langka dan meningkat harganya sehingga semakin sulit bagi

para pengusaha tersebut untuk memproduksi barang yang dapat bersaing di pasar internasional.

Kondisi di atas menunjukkan adanya perbedaan pandangan dan kepentingan yang berbeda sehingga terjadi tarik menarik kepentingan terhadap kebijakan rotan nasional. Di satu sisi, eksportir bahan asalan rotan merasa dirugikan dan pemerintah daerah penghasil rotan cenderung menginginkan diijinkannya ekspor bahan asalan karena kebijakan ini sangat menunjang upaya peningkatan pendapatan ekspor mereka yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan regional. Sementara itu di lain pihak Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia, Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia, dan Asosiasi Industri Permebelan dan Furnitur Indonesia cenderung menginginkan ekspor bahan asalan dilarang agar mereka dapat menikmati pasokan bahan baku dengan harga yang tidak mahal. Sayangnya, lokasi sentra produksi industri mebel dan kerajinan rotan (di Cirebon dan sekitar Surabaya) tidak sama dengan lokasi penghasil bahan baku, sehingga kepentingan dari kedua belah pihak merupakan hal yang tidak berkaitan atau tidak saling melengkapi. Kerugian yang diderita satu pihak tidak berdampak terhadap kerugian pihak yang lain. Akibatnya kedua belah pihak tetap bersikukuh pada dua pilihan yang ekstrem tersebut, sehingga tidak ada upaya untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.

Dalam hal keseimbangan jumlah kebutuhan pasar dalam negeri untuk bahan rotan, hal ini juga masih menjadi perdebatan yang berkepanjangan. Pihak pemasok bahan rotan berdalih kebutuhan dalam negeri sebenarnya tidak terlalu tinggi dan jauh di bawah kapasitas pasokan sehingga dikhawatirkan terjadi kelebihan pasokan yang berdampak kepada turunnya harga. Sebaliknya, pihak industri justru berkilah pasokan sering langka sehingga dapat mengganggu stabilitas harga dan daya saing produk di luar negeri. Di pasar internasional sendiri, produk industri mebel dan kerajinan rotan Indonesia menghadapi ancaman persaingan yang ketat dari Vietnam dan Cina, baik dalam hal harga maupun kualitas. Dengan mempertimbangkan kapasitas pasokan bahan asalan dalam negeri Vietnam dan Cina yang jauh di bawah kemampuan Indonesia, menjadi pertanyaan bagaimana produksi mereka, terutama Cina, mampu memproduksi barang dengan kualitas yang lebih baik namun harganya bersaing dengan produksi Indonesia.

Salah satu permasalahan yang cukup serius dihadapi pemerintah Indonesia adalah adanya dugaan kegiatan penyelundupan bahan rotan ke luar negeri dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini sangat merugikan karena Indonesia kehilangan potensi pendapatan dari ekspor rotan yang diselundupkan tersebut. Hal lain yang juga penting untuk dipertimbangkan adalah perlunya dilakukan pengembangan budidaya rotan di Indonesia supaya tidak terjadi perambahan hutan yang berlebihan.

Kasus 3: industri kayu lapis

Perjalanan industri kayu lapis di Indonesia sejak pertengahan tahun 1990an merupakan salah contoh dari proses deindustrialisasi. Ketika negara-negara berkembang (termasuk Cina) menggenjot industrialisasi di dalam negeri mereka, Indonesia justru menyaksikan proses keruntuhan dari beberapa industri yang sudah mulai mapan atau bergerak menuju ke arah mapan seperti industri kayu lapis dan tekstil (dalam batas tertentu industri pesawat terbang juga termasuk).

Industri kayu lapis di Indonesia mengalami jaman keemasan pada tahun 1980an hingga pertengahan tahun 1990an. Salah satu faktor yang mendukung hal ini adalah adanya kebijakan yang membatasi atau melarang ekspor kayu gelondongan, sehingga pasokan bahan baku domestik relatif berlimpah dan bahkan cenderung *under valued*. Pada periode tersebut, Indonesia yang sebelumnya merupakan negara pengekspor terbesar kayu gelondongan (1970an) bergeser menjadi negara industri terbesar dalam hal produk olahan hasil hutan, terutama kayu lapis. Pada periode tersebut nilai ekspor industri kayu lapis Indonesia meningkat pesat dan peranan Indonesia di pasar kayu lapis dunia sangat dominan. Di dalam negeri sendiri, pendapatan ekspor dari kayu lapis menjadi penyumbang ekspor non-migas yang terbesar. Selain itu, jumlah tenaga kerja di sektor perkayuan dan produk kayu meningkat 14 kali lipat dari 42.000 di tahun 1975 hingga mencapai 562.000 di tahun 1997. Namun jumlah ini kemudian turun menjadi 392.000 di tahun 2000[3].

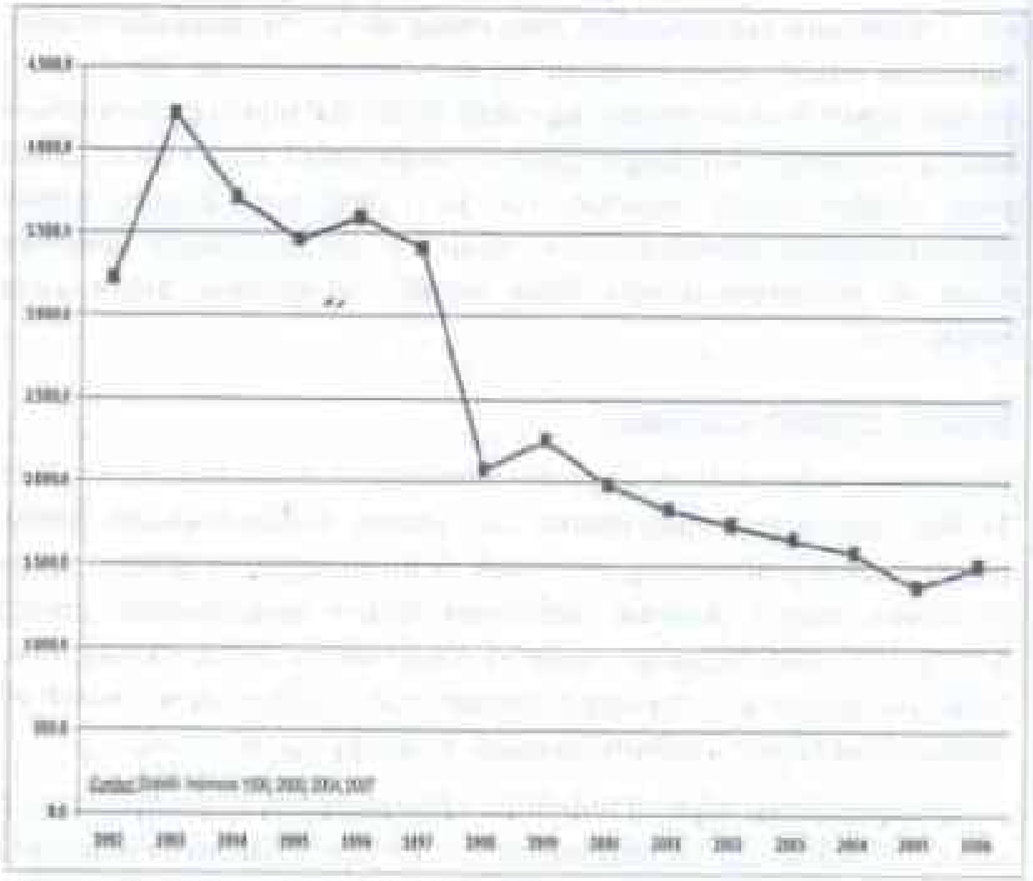

Sumber: Statistik Indonesia 1996, 2000, 2004, 2007

Gambar 12.3. Perkembangan Nilai Ekspor Kayu Lapis Indonesia 1992-2006 (Juta USD)

Sejalan dengan perkembangan konsumen dunia yang mulai mempersoalkan aspek lingkungan hutan tropis, produksi kayu lapis Indonesia mulai terkoreksi. Sejak tahun 1993 produksi kayu lapis Indonesia cenderung mulai menurun (lihat grafik pada Gambar 12.3). Selain itu, beberapa kajian internasional cenderung menyorot harga kayu log Indonesia yang dinilai *over valued*, sehingga mereka cenderung menyarankan larangan/pembatasan ekspor kayu gelondongan dihapuskan dengan alasan Indonesia akan mendapatkan penghasilan yang lebih banyak dari ekspor kayu gelondongan daripada ekspor kayu lapis. Tekanan internasional yang paling besar adalah pada saat krisis ekonomi 1998, di mana Indonesia mendapatkan bantuan dari IMF yang salah satu butir dalam *Letter of Intent* (LOI)-nya mempersyaratkan liberalisasi ekspor kayu gelondongan. Namun, ternyata liberalisasi

ekspor kayu gelondongan malah membuat marak kegiatan penebangan hutan secara ilegal sehingga akhirnya ekspor kayu gelondongan diperketat kembali.

Sementara itu di sisi industri kayu lapis, fasilitas yang dimiliki selama berlakunya kebijakan pengketatan ekspor kayu gelondongan, sayangnya tidak dimanfaatkan secara optimal. Pada periode tersebut pihak industri terlena dimanjakan oleh pasokan bahan baku yang relatif murah ("under-valued") sehingga lupa meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas sebagai faktor utama daya saingnya. Akibatnya, dengan adanya perubahan kebijakan kayu log sangat berdampak kepada kinerja industri kayu lapis. Sebagaimana terlihat pada gambar 12.3, pendapatan ekspor kayu lapis Indonesia menurun drastis pada tahun 1998, dan sejak 1999 nilai ekspor tersebut menurun secara konsisten.

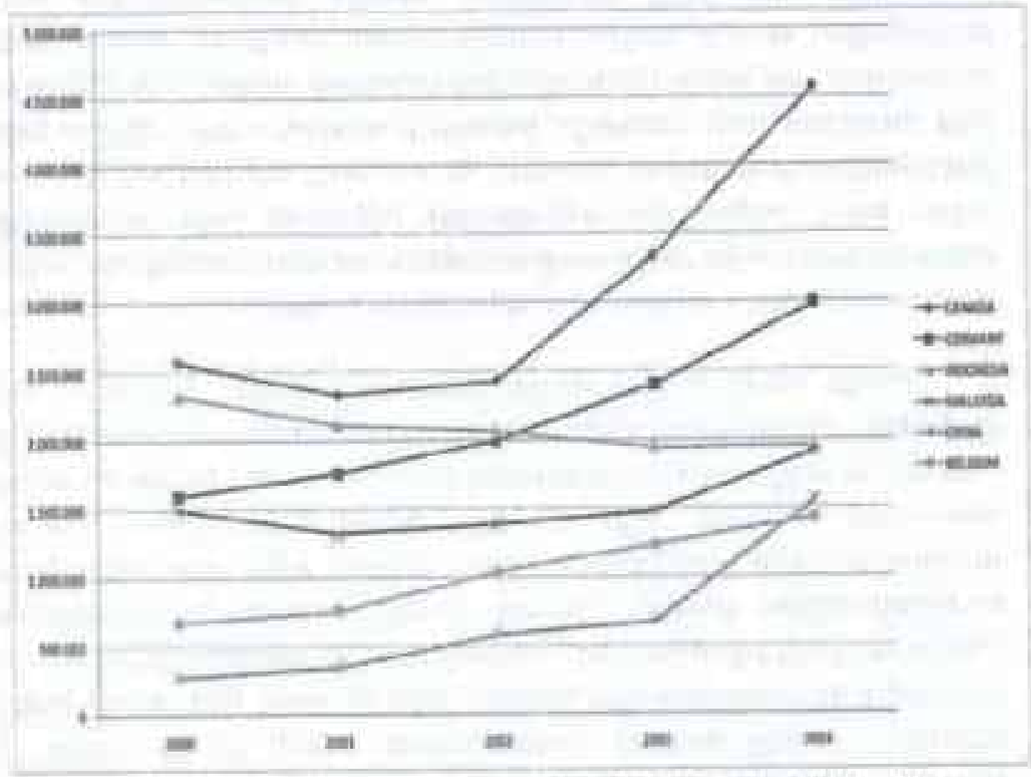

Sumber: International Trade Statistics 2000-2004, COMTRADE- UN Statistics Division, 2005

Gambar 12.4. Perkembangan nilai ekspor kayu lapis beberapa negara 2000-2004 (000 USD)

Satu hal yang menarik dengan perkembangan industri kayu lapis ini adalah kecenderungan meningkatnya produksi dan pendapatan ekspor negara-negara lain yang semakin mengalahkan Indonesia. Berdasarkan database COMTRADE (United Nations Statistics Division), posisi pendapatan ekspor Indonesia dari komoditas *veneer* dan kayu lapis (SITC-634) pada tahun 2000 masih nomor dua terbesar di bawah Kanada (lihat Gambar 12.4). Namun, pada tahun 2004 posisi Indonesia melorot menjadi ketiga terbesar di bawah Kanada dan Jerman, bahkan hampir disamai oleh Malaysia dan Cina. Jika kecenderungan ini berlangsung terus, maka dikhawatirkan industri kayu lapis Indonesia akan semakin terpuruk, dan semakin banyak penduduk kehilangan pekerjaan.

Selain ancaman dari pesaing, salah satu hal yang sangat mengganggu Indonesia adalah masih tetap berjalannya praktik-praktik penebangan liar yang dilanjutkan dengan penyelundupan kayu gelondongan ke luar negeri sehingga selain dirugikan oleh semakin meluasnya areal hutan (lindung) yang tertebang, pemerintah Indonesia juga dirugikan oleh hilangnya potensi pendapatan dari ekspor kayu gelondongan selundupan tersebut. Di sisi lain, industri olahan kayu (kayu lapis, mebel, dan sebagainya) Indonesia juga menghadapi ancaman persaingan harga yang semakin ketat dari pesaing luar negeri yang membeli kayu gelondongan selundupan tersebut.

Ketiga kasus di atas memperlihatkan beberapa kesamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah ketiganya merupakan komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dari sisi bahan baku. Selain itu ketiga komoditas tersebut juga sedang menghadapi dilema antara mempertahankan pendapatan ekspor bahan baku dan atau lebih mengembangkan produk turunan sektor industri pengolahannya. Perbedaan yang signifikan dari ketiganya adalah masing-masing berada pada tahapan pengembangan industri yang berbeda. Pada kasus kakao misalnya, jumlah industri pengolahannya masih cukup langka di Indonesia. Sementara itu di pasar dunia, industri olahan kakao pada umumnya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang sudah sangat mapan dan sudah berpuluh tahun bergerak di bidang tersebut. Oleh sebab itu, upaya mengembangkan industri pengolahan kakao mau tidak mau harus memperhitungkan peranan dan keterlibatan perusahaan

yang sudah mapan tersebut. Jika ingin mengembangkan industri pengolahan sendiri maka perlu didukung oleh permintaan pasar konsumen lokal yang cukup stabil. Dalam hal ini salah satu keunggulan komparatif Indonesia adalah jumlah penduduknya yang sangat banyak. Dengan jumlah penduduk besar itu pasar domestik menjadi sangat potensial untuk dimanfaatkan oleh produk olahan kakao atau produk makanan berbasis kakao.

Untuk kasus rotan, industri pengolahannya sudah melakukan ekspor, namun daya saingnya relatif masih lemah. Untuk itu peningkatan daya saing produksi industri melalui efisiensi produksi dan standarisasi desain merupakan agenda penting bagi komoditas ini. Selain itu, menciptakan informasi kebutuhan pasokan yang transparan serta memperkuat keterkaitan vertikal antar industri juga menjadi agenda yang penting dalam upaya menciptakan sinergi antara produsen bahan baku dan produsen industri pengolahan. Secara spasial pengembangan sentra-sentra produk rotan setengah jadi yang hasilnya memiliki keterkaitan dengan produk olahan akhir (di Jawa) dapat dikembangkan di lokasi-lokasi sumber bahan baku. Keuntungan Indonesia saat ini masih merupakan pemasok utama bahan baku rotan sehingga posisi tawarnya masih sangat tinggi. Permasalahannya adalah bagaimana memberantas penyelundupan bahan baku rotan agar tidak terjadi "subsidi" kepada pengusaha industri olahan di luar negeri.

Pada kasus industri kayu lapis yang terjadi adalah proses industri yang sudah melewati fase puncak dan sedang bergerak turun. Untuk kasus ini maka upaya revitalisasi industri perlu dilakukan dengan terlebih dahulu mengkaji kompetensi dari masing-masing pesaing di pasar. Saat ini pesaing yang paling potensial adalah Cina yang menunjukkan grafik pertumbuhan pesat beberapa tahun belakangan ini. Negara ini cenderung memanfaatkan kombinasi antara teknologi tingkat menengah dengan tenaga kerja upah murah. Namun pertumbuhan ekonomi Cina yang pesat selama beberapa tahun belakangan ini tentunya akan meningkatkan upah tenaga kerja mereka. Pesaing lain dari Eropa pada umumnya memiliki keunggulan di bidang teknologi proses. Pengetahuan akan kompetensi dari masing-masing pesaing dapat digunakan untuk menyusun strategi revitalisasi industri kayu lapis Indonesia.

Dilema antara keinginan untuk mendapatkan hasil ekspor yang cepat dengan upaya membangun industri dalam negeri menjadi salah satu permasalahan yang akan semakin sering dihadapi Indonesia. Di masa depan Indonesia akan lebih dituntut untuk mengembangkan kegiatan sektor industri sebagai landasan struktur ekonomi. Selain meningkatkan nilai tambah, pengembangan sektor industri memberi peluang bagi pengembangan lapangan kerja yang lebih luas dan sekaligus meningkatkan permintaan terhadap produk bahan mentah lokal. Oleh sebab itu sektor pertanian sudah waktunya untuk lebih mengembangkan kegiatan agro industri. Dengan kata lain, keunggulan komparatif lokasi perlu dikombinasikan dengan peningkatan daya saing. Dalam hal ini maka strategi pengembangan industri di Indonesia perlu mengkombinasikan sinergi dari dua unsur: *keunggulan komparatif lokasi* dan *keunggulan kompetitif industri (keunggulan persaingan industri)*.

12.3. Keunggulan Kompetitif

Secara tradisional keunggulan komparatif lokasi merupakan faktor-faktor yang dimiliki secara spesifik oleh lokasi seperti sumberdaya alam, jumlah penduduk, budaya, dan sebagainya (lihat pembahasan pondasi-1 Hoover di Bab 2). Namun, sebagaimana sudah ditunjukkan pada beberapa contoh kasus di atas, memiliki keunggulan komparatif saja tidaklah cukup untuk menjamin keberlanjutan perekonomian suatu wilayah. Jumlah penduduk yang terus bertambah tentunya harus diantisipasi dengan upaya penyediaan lapangan kerja dan fasilitas sosial-ekonomi yang memadai. Hal-hal tersebut pada dasarnya dapat dipenuhi jika perekonomian wilayah yang bersangkutan mampu mengembangkan industri yang tepat dan berkelanjutan yang dapat membuka lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mereka mampu membeli barang-barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu pembangunan industri menjadi agenda penting yang harus direncanakan dan dilaksanakan oleh setiap negara/ wilayah pada abad 21 ini.

Di lain pihak, perkembangan perekonomian global mendorong setiap produsen untuk mencari pasar yang seluas-luasnya bagi barang hasil produksinya di seluruh dunia. Hal ini pada gilirannya menciptakan

persaingan global, tidak hanya pada tingkat negara melainkan juga masuk menembus batas-batas negara hingga ke tingkat lokal/wilayah. Persaingan global kini sudah mulai merambah hingga ke depan pintu perekonomian lokal/wilayah. Industri lokal pun kini tidak hanya bersaing dengan pesaing regional, namun mereka juga harus menghadapi pesaing internasional untuk memperebutkan pasar.

Dengan demikian persaingan dan daya saing industri menjadi kata kunci yang sangat penting bagi upaya pengembangan perekonomian wilayah di abad 21. Dalam pada itu pembangunan industri kini bukan hanya melulu menjadi masalah nasional saja, melainkan juga sudah menjadi bagian dari agenda permasalahan lokal/ regional.

Dalam kaitan dengan isu persaingan global, Michael Porter mengatakan pertumbuhan industri yang berkelanjutan sukar diharapkan dapat terjadi jika suatu negara hanya menggantungkan diri kepada keunggulan komparatif saja. Untuk itu Porter mengajukan model intan (*diamond model*) sebagai model dasar bagi pengembangan keunggulan persaingan suatu negara. Menggunakan model ini suatu negara dapat mengevaluasi posisi mereka dalam kompetisi global serta dapat menyusun strategi pengembangan industri ke masa depan dalam rangka meningkatkan daya saingnya. Model intan Porter terdiri atas 4 faktor utama yang memiliki hubungan saling keterkaitan, yakni[4] (lihat Gambar 12.5):

- Strategi perusahaan, stuktur dan persaingan
- Kondisi permintaan
- Industri pendukung dan terkait
- Faktor-faktor kondisi

Dunia pada dasarnya didominasi oleh kondisi dinamis. Persaingan yang bersifat langsung cenderung mendorong perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan inovasinya. Dengan demikian strategi perusahaan, struktur dan persaingan akan banyak ditentukan oleh produktivitas yang dimotori oleh inovasi masyarakat.

Konsumen yang kritis di suatu negara cenderung akan memberikan tekanan kepada industri untuk selalu memperbaiki diri meningkatkan daya saingnya melalui produk-produk yang inovatif dan berkualitas tinggi. Oleh sebab itu, kondisi permintaan juga turut mempengaruhi tingkat kualitas dan kreativitas dan inovasi dari industri.

Kedekatan spasial baik pada industri hulu atau pun hilir, akan memfasilitasi terjadinya pertukaran informasi dan merangsang pertukaran ide serta inovasi yang terus menerus. Dalam kaitan ini industri pendukung dan terkait akan menjadi lebih optimal jika dapat membentuk jaringan keterkaitan dalam suatu kluster (baik sektoral maupun spasial).

Dalam kaitan dengan faktor-faktor kondisi, Porter menekankan bahwa faktor kunci dari produksi harus diciptakan dan bukan sesuatu yang diwariskan. Faktor-faktor spesialisasi dari produksi adalah tenaga kerja yang trampil, modal dan prasarana. Faktor-faktor bukan kunci atau faktor umum seperti tenaga kerja tidak terampil dan bahan baku dapat diambil oleh perusahaan lain manapun, sehingga tidak membangkitkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Namun, faktor-faktor spesialisasi mempersyaratkan dan melibatkan investasi yang besar dan berkelanjutan. Karena itu mereka cenderung lebih sulit untuk diduplikasi atauditiru. Hal ini menciptakan keunggulan kompetitif karena jika perusahaan lain tidak dapat dengan mudah menduplikasi faktor-faktor tersebut, maka mereka menjadi sangat bernilai.

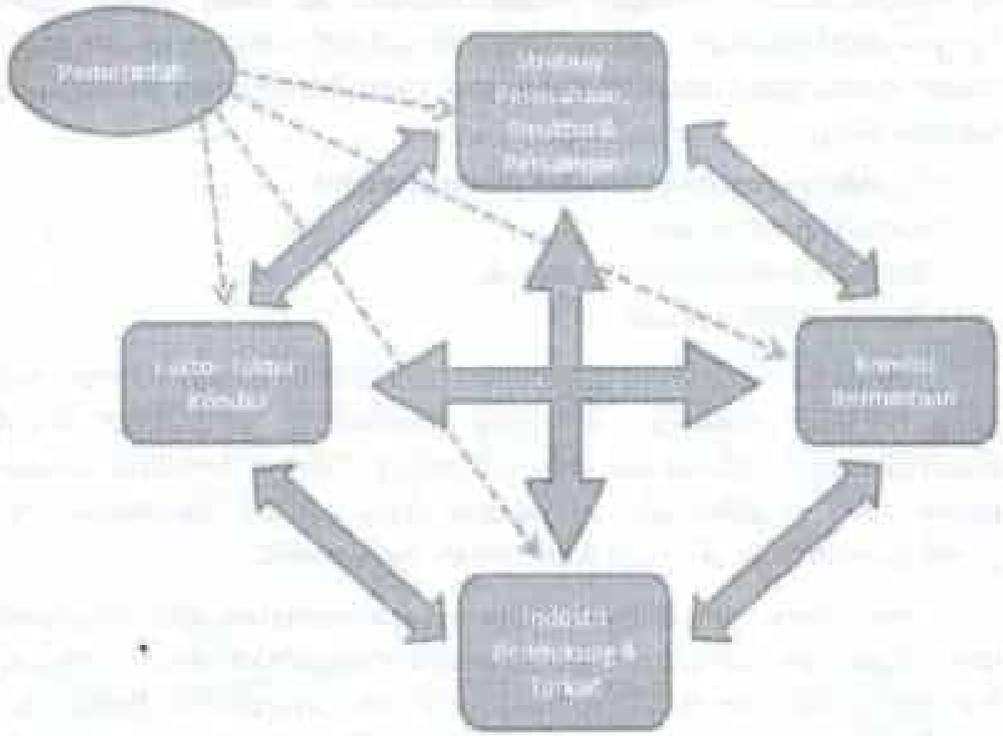

Gambar 12.5. Model Intan Porter

Selanjutnya menurut Porter peran pemerintah dalam model intan adalah sebagai katalis dan penantang, untuk mendorong perusahaan untuk meningkatkan aspirasi mereka dan berpindah ke tingkat persaingan yang lebih tinggi. Mereka harus mendorong perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan kinerja mereka, merangsang permintaan atas produk-produk *advanced*, fokus terhadap penciptaan faktor spesialisasi dan merangsang persaingan lokal. Dengan demikian, peran pemerintah adalah merangsang, mendorong dan memfasilitasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan keempat faktor utama dari model intan Porter, agar dapat tercipta sinergi yang secara keseluruhan meningkatkan daya saing produk nasional.

Konsep keunggulan kompetitif yang diajukan Porter dalam beberapa hal memiliki persamaan dengan konsep Schumpeter. Sebagaimana kita lihat dari uraian di atas, inovasi menjadi motor penggerak utama untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu perusahaan atau industri dan bangsa. Hal ini hampir sama dengan konsep Schumpeterian yang memandang inovasi sebagai alat bagi perusahaan *entrepreneur* untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Perbedaannya, penganut Schumpeterian cenderung memandang kekuatan monopoli dan ukuran perusahaan yang besar sebagai prasyarat bagi kesuksesan perusahaan *entrepreneur* untuk dapat berperan sebagai motor penggerak perekonomian[5]. Sedangkan dalam konsep keunggulan kompetitif belakangan ini, kondisinya tidak selalu harus demikian. Dalam beberapa kasus dapat saja terjadi keunggulan suatu industri dibangun oleh kombinasi dan sinergi beberapa perusahan kecil yang membentuk rantai nilai suatu industri secara bersama-sama dan saling melengkapi di suatu lokasi/ wilayah/ negara. Dalam hal ini faktor saling melengkapi antar pelaku industri dapat saja berperan menjadi salah satu kekuatan utama bagi terbentuknya suatu daya saing kelompok.

12.4. Kluster Ekonomi

Pada tingkat yang lebih operasional, model Porter di atas membawa kita kepada konsep kluster ekonomi, yakni terbentuknya kelompok

perusahaan, pemasok, industri terkait dan kelembagaan yang saling terkaitkan di suatu lokasi tertentu yang kegiatannya saling melengkapi sehingga membentuk sinergi dalam memproduksi hasil industri tertentu. Konsep ini merupakan hasil sinergi dari faktor-faktor keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif.

Konsep kluster ekonomi pada dasarnya memiliki banyak persamaan dengan konsep-konsep sebelumnya yang sudah dibahas dalam teori ekonomi lokasi yang berkaitan dengan konsentrasi kegiatan ekonomi/ industri secara spasial (aglomerasi, eksternalitas, dan sebagainya). Perbedaannya yang mencolok adalah adanya unsur daya saing yang dijadikan sebagai tujuan bersama bagi industri di lokasi yang bersangkutan. Perbedaan yang lain dari konsep kluster ekonomi adalah pendekatan analisisnya yang banyak mengupas ranah strategi. Pada model klasik persaingan Hotelling dan eksternalitas Marshall, unsur persaingan antar industri yang terkonsentrasi di suatu lokasi sebenarnya sudah dikupas, namun pembahasan yang dilakukan pada umumnya belum banyak menyinggung ranah penyusunan strategi. Dalam kaitan ini pendekatan kluster ekonomi lebih banyak mengarah kepada aspek perencanaan strategik dalam upaya meningkatkan daya saing global suatu (industri yang berkonsentrasi di) lokasi.

Konsep kluster ekonomi juga memiliki beberapa persamaan dengan konsep kutub pertumbuhan yang diajukan oleh Perroux tahun 1950an. Fokus dari konsep kluster ekonomi yang mempelajari bagaimana industri hilir (*end-market industries*) mengarahkan kedalaman dan keluasan rantai nilai yang mereka kuasai mirip dengan peranan industri propulsif pada model kutub pertumbuhan Perroux[6]. Pada tahun 1960an hingga 1970an model kutub pertumbuhan Perroux sempat banyak dijadikan acuan di berbagai negara untuk menyusun rencana strategik pengembangan wilayah melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan. Namun implementasinya ternyata tidak banyak memperlihatkan keberhasilan sehingga teori ini banyak menerima kritikan dan kerap dianggap gagal. Sebagaimana disebutkan oleh Bergman dan Feser (2003), kritik utama terhadap kegagalan model Perroux menurut Malizia dan Feser (1998) adalah karena konsep tersebut tidak atau kurang mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi lokal sebagai prasyarat terlaksananya sinergi antara industri propulsif dengan industri-industri

terkait (*backward* dan *forward linkages*)[7]. Hal ini dikoreksi dalam konsep kluster ekonomi yang menerapkan model intan Porter.

Pada tahun 1960an hingga 1980an berkembang beberapa konsep yang mengacu kepada perdagangan internasional seperti konsep *free trade zone*, *export processing zone* dan kawasan berikat (*bonded zone*). Konsep-konsep tersebut dalam perjalanan sejarahnya pernah mengalami masa keemasan di beberapa negara (AS, Singapura, Taiwan, Mauritius, dan sebagainya) yang kemudian banyak ditiru oleh negara-negara lain, termasuk Batam di Indonesia dan Shenzhen di Cina[8]. Modifikasi yang cukup populer dari konsep ini salah satunya adalah pengembangan kawasan industri yang dikelola oleh pengelola khusus baik pemerintah maupun swasta.

Tahun 1980an, sejalan dengan perkembangan pesat teknologi, berkembang pula konsep tentang *(high) technology park*. Pada konsep ini sinergi riset dan pengembangan antara universitas sebagai pusat riset dengan industri sebagai pengembang/implementatornya dianggap dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi proses produksi serta memacu perkembangan produk-produk yang berbasis teknologi. Pengembangan teknologi canggih pada umumnya tidak dilakukan secara massal melainkan melalui kegiatan yang dilakukan pada unit-unit usaha skala kecil. Oleh sebab itu konsep ini dalam beberapa hal berkaitan erat dengan konsep pengembangan ekonomi lokal yang banyak dikembangkan di Amerika Serikat tahun 1980an. Model-model pengembangan teknologi canggih yang diterapkan pada strategi pengembangan ekonomi lokal banyak diilhami oleh kesuksesan industri komputer di Silicon Valey[9].

Konsep kluster ekonomi atau kluster industri menjadi populer sebagai konsep perencanaan pembangunan baik di Amerika Serikat maupun di Eropa sejak tahun 1990an. Cerita sukses dari beberapa lokasi seperti Silicon Valley di California-AS, Third Italy – Emilia Romagna[10] dan Castell Goffredo[11] di Italia membuat banyak pemerintahan lokal yang tertarik untuk menerapkan strategi pembangunan ekonomi berbasis kluster. Di AS sejak tahun 1990an sudah banyak negara bagian yang menyusun rencana pembangunan dan menerapkan model pembangunan yang berbasis kluster.

Bagaimana dengan Indonesia? Sejak tahun 1999 Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang memberi mandat lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan di wialyahnya masing-masing. Hal ini membuat banyak pemerintah daerah memiliki kebebasan lebih besar untuk menyusun strategi pembangunannya masing-masing. Dalam kaitan ini, maka penyusunan strategi pembangunan daerah tersebut dapat saja mengacu kepada model yang berbasis kluster industri/ekonomi. Namun hal itu tidak berarti bahwa antara pemerintah daerah (kabupaten/kota) satu dengan yang lain lantas harus saling bersaing dan saling mengalahkan[12]. Sebab hakekat dari pendekatan ekonomi berbasis kluster, selain mengembangkan inovasi, pendekatan ini juga menganjurkan adanya kerjasama dalam persaingan (cooperative competition) sehingga mampu bersaing di pasar global[13].

Sebagaimana sudah disebutkan terdahulu, persaingan global cenderung membuka peluang bagi berbagai perusahaan baik lokal maupun internasional untuk saling berkompetisi. Dengan demikian perusahaan-perusahan lokal di daerah juga akan menghadapi ancaman persaingan dari perusahaan-perusahaan internasional. Jika pemerintah daerah ingin mempertahankan eksistensi perusahaan lokal, maka sejak sekarang mereka sudah harus mempersiapkan iklim kompetisi usaha yang sehat serta memfasilitasi upaya pengembangan daya saing perusahaan lokal. Oleh sebab itu, dalam merencanakan pembangunan wilayahnya, masing-masing pemerintah hendaknya menerapkan kombinasi pendekatan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dengan fokus kepada upaya peningatan daya saing melalui pengembangan inovasi dan kewirausahaan serta mempertimbangkan kerjasama dalam persaingan dengan daerah-daerah sekitarnya dalam rangka meningkatkan posisi tawar di pasar global.

Di lain pihak, pemerintah pusat juga sudah mulai menyusun konsep pengembangan industri jangka panjang baik secara sektoral maupun spasial. Upaya mengembangkan industri melalui pembangunan kawasan industri yang dikelola pihak pemerintah atau swasta sudah semakin digalakkan penerapannya di daerah. Kebijakan kawasan industri ini diharapkan dapat membantu daerah menciptakan kluster industri serta sekaligus melokalisasi kemungkinan dampak lingkungan

yang ditimbulkan oleh industri. Hal ini selain bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan ekonomi dan kesenjangan distribusi penduduk antara wilayah di Indonesia, khususnya antar pulau Jawa dan luar Jawa. Pembangunan industri di luar Jawa diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat migrasi penduduk dari luar Jawa ke Jawa.

Sementara itu beberapa wilayah juga sudah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dalam upaya meningkatkan daya saing produk ekspor. Begitu pula rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus sudah mulai disosialisasikan ke daerah. Pendek kata, untuk mengantisipasi globalisasi ekonomi serta penerapan sistem perdagangan yang semakin menuju ke pasar bebas, pemerintah pusat dan pemerintah harus bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan (baik pihak swasta maupun masyarakat) agar dapat bersama-sama menyusun dan menjalankan strategi pengembangan ekonomi wilayah yang berkelanjutan serta memiliki daya saing global.

Catatan

[1] *ICCO Annual Report 2005/2006*. Menurut laporan tersebut produksi biji kakao Indonesia tahun 2005/2006 sebesar 470 ribu ton atau ketiga terbesar di dunia setelah Pantai Gading (1.287 ribu ton) dan Ghana (741 ribu ton).

[2] ICCO Annual Report 2005/2006. ibid. Hal. 13-14.

[3] Aswicahyono, Haryo. 2004. *Competitiveness and Efficiency of the Forest Product Industry in Indonesia*. Economic Working Paper Series. http://www.csis.or.id/papers/wpe075. CSIS, Jakarta

[4] Lihat Value Based Management.Net. Diamond model- Porter on nations

[5] Basant, Rakesh (2002). *Knowledge Flows and Industrial Clusters: An Analytical Reviewof Literature*, East West Center Working Paper- Economic Series, No. 40, February 2002.

[6] Bergman E.M. and Feser, E.J. (2003). *Industrial and Regional Clusters: Concepts and Comparative Applications*. Chapter 2. West Viginia University, The Web Book of Regional Science. http://www.rri.wvu.edu/WebBook/Bergman-Feser/contents.htm

[7] Bergman E.M. and Feser, E.J. (2003). ibid. Chapter 2.

[8] Lihat Heri Muliono. 2001. *Merajut Batam Masa Depan*. LP3ES, Jakarta 2001.

[9] Lihat Malecki, E.J (1984). *High Technology Sectors and Local Economic Development*, American Planning Association Journal, 50, 262-9.

[10] Humphrey, J. And Hubert Schmidtz, (1995). *Principles for Promoting Cluster and Networks of Small Medium Enterprises*, No. 1. Paper commisioned by Small Medium Enterprises Branch of United Nations Development Organization (UNIDO), Vienna, Austria, October 1995.

[11] Rosenfeld, Stuart A. (1997). *Bringing Business Clusters into the Mainstream of Development*. European Planning Studies. Feb. 1997, Vol. 5 Issue 1.

[12] Sebagai contoh misalnya beberapa pemerintah daerah merencanakan pembangunan pelabuhan/ bandara sendiri, dan cenderung tidak mau bekerjasama dengan daerah lain dalam memanfaatkan prasarana dasar yang ada. Akibatnya pembangunan prasarana tersebut menjadi tidak efisien dan antar sesama pemerintah daerah terjadi persaingan yang semakin mengurangi daya saing mereka. Padahal jika mereka mau bekerja sama, maka kegiatan ekonomi dapat berlangsung lebih efisien dan skala ekonomi menjadi meningkat sehingga memiliki posisi tawar dan daya saing global yang semakin tinggi.

[13] Bergman E.M. dan Feser, E.J. (2003). Ibid.

Bahan Bacaan

1) Aswicahyono, Haryo. 2004. *Competitiveness and Efficiency of the Forest Product Industry in Indonesia*. Economic Working Paper Series. http://www.csis.or.id/papers/wpe075. CSIS, Jakarta

2) Basant, Rakesh (2002). *Knowledge Flows and Industrial Clusters: An Analytical Reviewof Literature*, East West Center Working Paper- Economic Series, No. 40, February 2002.

3) Bergman E.M. and Feser, E.J. (2003). *Industrial and Regional Clusters: Concepts and Comparative Applications*. Chapter 2. West Viginia University, The Web Book of Regional Science. http://www.rri.wvu.edu/WebBook/Bergman-Feser/contents.htm

4) Heri Muliono. 2001. *Merajut Batam Masa Depan*. LP3ES, Jakarta 2001.

5) Humphrey, J. And Hubert Schmidtz, (1995). *Principles for Promoting Cluster and Networks of Small Medium Enterprises*, No. 1. Paper commisioned by Small Medium Enterprises Branch of United Nations Development Organization (UNIDO), Vienna, Austria, October 1995.

6) International Cocoa Organization (ICCO) Annual Report 2005/2006.

7) Malecki, E.J (1984). *High Technology Sectors and Local Economic Development*, American Planning Association Journal, 50, 262-9.

8) Rosenfeld, Stuart A. (1997). *Bringing Business Clusters into the Mainstream of Development*. European Planning Studies. Feb. 1997, Vol. 5 Issue 1.

DAFTAR PUSTAKA

1) Arrow, Kenneth J. (1962). *The Economic Implications of Learning by Doing*. Review of Economic Studies No.80, June, 1962. Hal.155-173.

2) Aswicahyono, Haryo. 2004. *Competitiveness and Efficiency of the Forest Product Industry in Indonesia*. Economic Working Paper Series. http://www.csis.or.id/papers/wpe075. CSIS, Jakarta.

3) Barro, Robert J. (1998). *Notes on Growth Accounting*. Working Paper 6654, National Bureau of Economic Research (NBER), Cambridge, July 1998.

4) Basant, Rakesh (2002). *Knowledge Flows and Industrial Clusters: An Analytical Review of Literature*. East West Center Working Paper-Economic Series, No. 40, February 2002.

5) Baumol, William J. and Alan S. Blinder (1985). *ECONOMICS-Principles and Policy*; third edition; Harcourt Brace Jovanovich, 1985.

6) Bendavid, Avrom (1974). *Regional Economic Analysis for Practitioners*. Revised Edition. Praeger: New York.

7) _____ (1991). *Regional and Local Economic Analysis for Practitioners*. Fourth edition, Praeger Publisher. New York.

8) Bergman E.M. and Feser, E.J. (2003). *Industrial and Regional Clusters: Concepts and Comparative Applications*. West Viginia University, The Web Book of Regional Science. http://www.rri.wvu.edu/WebBook/Bergman-Feser/contents.htm

9) Bhagwati, Jagdish (1996). *The Miracle that did Happen: Understanding East Asia in Comparative Perspective*. Keynote speech pada konferensi tentang Pemerintah dan Pasar, Universitas Cornell, May 3, 1996.

10) Blakely, Edward J. (1989). *Planning Local Economic Development: Theory and Practice*. Sage Library of Social Research: London.

11) _____ and Ted . Bradshaw (2002). *Planning Local Economic Development- Theory and Practice.* Sage Publications, Inc., 3rd edition. USA. 2002.

12) Cahyat, Ade (2004). *Bagaimana Kemiskinan Diukur? Beberapa model penghitungan kemiskinan di Indonesia.* CIFOR, Governance Brief No 2, November 2004,

13) Castells, Manuel (1991). *The Informational City: Information Technology, Economic Restructuring and the Urban-Regional Process.* Oxford. Basil Blackwell.

14) Chambers, Robert (1993). *Rural Development: Putting the Last First.* 13th reprinting. Longman Scientific & Technical.

15) Dinc, Mustafa (2002). *Regional and Local Economic Analysis Tools.* Paper prepared for Public Finance, Decentralization and Poverty Reduction Program, World Bank Institute, The World Bank, Washington DC, January 2002.

16) Dixit, Avinash and Joseph Stiglitz (1977). *Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity.* The American Economic Review. Vol. 67 No. 3 June 1977. Hal. 297- 308.

17) Dornsbuch, Rudiger and Stanley Fischer (1990). *Macroeconomics.* Fifth Edition, McGraw-Hill Book Co- Singapore, 1990. Dunn-Rankin, Peter (1983). Scaling Methods . Lawrence-Erlbaum Associates Inc., New Jersey, 1983.

18) Fujita, M. (2000). *Thunen and the New Economic Geography.* Kyoto University, September 2000.

19) Gert- Jan Hospers (2004). *Regional Economic Change in Europe: a Neo Schumpeterian Vision,* LIT verlag Munster, 2004.

20) Gillis, Malcolm; Perkins, Dwight H.; Roemer, Michael; Snodgrass, Donald R. (1987). *Economics of Development.* Second Edition. W.W. Norton Company, Inc. New York.

21) Glaeser E.L.; Hedi D. Kallal; Jose A. Scheinkman; Andreis Sheleifer. (1992). *Growth in Cities.* The Journal of Political Economy, Vo. 100, No.6, Centennial Issue (Dec. 1992). Hal. 1126-1152.

22) Glasson, John. (1975). *An Introduction to Regional Planning.* Hutchinson & Co: London.

23) Hananto Sigit (2004). *Total Factor Productivity Growth: Survey Report. Part II – National Reports.* Report of the APO Survey on Total Factor Productivity 2001/2002. Asian Productivity Organization, Tokyo.

24) Heri Mulono (2001). *Merajut Batam Masa Depan.* LP3ES, Jakarta, November 2001.

25) Hewings, Geoffrey J.D. and Breandan O'hUallachain (1983). *Chapter 2 - Industrial Factors in the Development of Regional Systems* in *Spatial Analysis, Industryand the Industrial Environment.* Vol. 3 Regional Economics and Industrial Systems, edited by F.E.I. Hamilton and G.J.R. Linge. John Wiley & Sons Ltd, 1983.

26) Higgins, Benjamin and Donald Savoie (1997). *Regional Development Theories and Their Application.* Transaction Publishers, New Brunswick, New Jersey, 1997.

27) Hoover, Edgar M. dan Frank Giarattani (1987). *An Introduction to Regional Economic.*
Web book: http://www.rri.wvu.edu/WebBook/Giarratani/

28) Humphrey, J. And Hubert Schmidtz, (1995). *Principles for Promoting Cluster and Networks of Small Medium Enterprises,* No. 1. Paper commisioned by Small Medium Enterprises Branch of United Nations Development Organization (UNIDO), Vienna, Austria, October 1995.

29) Husted, Steven and Michael Melvin (1990). *International Economics.* Harper & Row Publisher Inc. New York.

30) Isard, Walter (1975). *Introduction to Regional Science.* Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1975.

31) _____ and Bramhhall, David F.; Carrothers, G.A.P.; Cumberland, J.H.; Moses, Leon N.; Price, D.O.; Schooler, E.W. (1976). *Methods of Regional Analysis: An Introduction to Regional Science.* Tenth Printing. The MIT Press, Cambridge, MA., USA.

32) Isserman, Andrew M. (1977). *The Location Quotient Approach to Estimating Regional Economic Impacts,* Journal of American Institute of Planners 43 (1) Jan. 1977, hal. 33-41.

33) Jane Jacobs. (1970). *The Economy of Cities*. Vintage Books Edition. February 1970.

34) Joh, David and Maggie Jarman (1980). *Central Place Provision in Theory and Practice: an Evaluation in Shropshire*. Field Studies 5 (1980), Hal. 259- 288.

35) Krugman, Paul R. (1979). *Increasing Returns, Monopolistic Competition, and International Trade*. Journal of International Economics 9, 4 (November 1979). Hal. 469-479.

36) _____ and Elhanan Helpman (1985). *Market Structure and Foreign Trade*. The MIT Press, Cambridge, MA., USA.

37) _____ (1990). *Rethinking International Trade*. The MIT Press, Cambridge, MA, USA.

38) _____ and Maurice Obsfield. (1991). *International Economics- Theory and Policy*. 2nd edition. HarperCollins Publisher Inc.

39) _____ (1991). *Geography and Trade*. MIT Press, 1991.

40) _____ (1994). *The Myth of Asia's Miracle*. Foreign Affairs, Vol 73. November/ December 1994.

41) _____ (1998). *The Role of Geography in Development*. Paper disajikan pada Annual World Bank Conference on Development Economics, Washington DC, April 1998.

42) Krumme, G. (2002). *Economic & Business Geography and the Knowledge-Based Space Economy A Learning Web*. http://faculty .washington.edu/krummme/

43) _____. *Economic Geography: Toward a Conceptual Framework*, http://faculty.washington.edu/krumme/207/concepts/

44) Landis, John D. (1985). *Electronic Spreadsheets in Planning: The Case of Shiftshare Analysis*. Journal of the American Planning Association. 1985.

45) Lipton, Michael (1977). *Why Poor People Stay Poor: A Study of Urban Bias in World Development*. Maurice Temple Smith Ltd. London.

46) Lucas, Robert E. Jr. (1988). *On the Mechanics of Economic Development*. Journal of Monetary Economics 22 (1988). North-Holland. hal. 3-42.

47) _____ (1993). *Making A Miracle*. Econometrica, Vol.61, No. 2 (March 1993). hal. 251-252.

48) Maki, Wilbur (1997). *Accounting for Local Economic Change in Regional Input-Output Modelling*. Journal of Regional Analysis and Policy, (1997) 27, 2: hal. 95-109.

49) Malecki, EJ (1984). High *Technology Sectors and Local Economic Development*, American Planning Association Journal, 50, 262-9.

50) Miernyk, William H. (1965). *The Elements of Input-Output Analysis*. Random House, New York, 1965.

51) Miller, Ronald E. and Peter D. Blair (1985). *Input-Output Analysis: Foundations and Extensions*. Prentice Hall: New Jersey.

52) Mueller M.G. editor. (1966). *Readings in Macroeconomics*. Holt, Rinehart and Winston inc., USA, 1966.

53) Oppenheim, Norbert (1980). *Applied Models in Urban and Regional Analysis*. Prentice Hall Inc.: New Jersey.

54) Richardson, Harry W. (1972). *Input-Output and Regional Economics*. John Willey & Sons. New York.

55) Roeruoe, Freddy, dan kawan-kawan (2003). *Batam, Komitmen Setengah Hati*. Aksara Karunia, Jakarta, 2003

56) Romer, Paul M. (1986). *Increasing Returns and Long Run Growth*. Journal of Political Economy, 1986, vol. 94, n0. 5, Hal. 1002- 1037.

57) Rosenfeld, Stuart A. (1997). *Bringing Business Clusters into the Mainstream of Development*. European Planning Studies. Feb. 1997, Vol. 5 Issue 1.

58) Royal Swedish Academy of Sciences. (2008). *Trade and Geography – Economies of Scale, Differentiated Products and Transport Costs*. Dokumen latar belakang ilmiah pemberian hadiah Nobel Ekonomi 2008 untuk Paul R. Krugman. Stockholm,13 Oktober 2008.

59) Salita, Domingo C. and Meliton B. Juanico (1983). *Chapter 19- Export Processing Zones: New Catalysts for Economic Development*,in *Spatial Analysis, Industryand the Industrial Environment*. Vol. 3 Regional Economics and Industrial Systems, edited by F.E.I. Hamilton and G.J.R. Linge. John Wiley & Sons Ltd, 1983.

60) Samuelson, Paul A. and William D. Nordhaus (1992). *Economics*, 14th edition. International Edition, McGraw-Hill, Inc. Singapore, 1992

61) Sarel, Michael (1996). *Growth in East Asia. What we can and what we cannot Infer*. IMF, Washington DC., November 1996.

62) Schaffer, William A. (1999). *Regional Impacts Model*. Georgia Institute of Technology. June 1999.

63) Setiono, Dedi Nugraha S. (1996). Perhitungan Analisis Location Quotient (LQ) dalam Analisis Ekonomi Wilayah. Modul Praktis 1- Ekonomi Wilayah dan Kota. Jurusan Planologi, Institut Teknologi Indonesia.

64) _____ (1997). Perhitungan Metoda Shiftshare dalam Analisis Ekonomi Wilayah. Modul Praktis 3- Ekonomi Wilayah dan Kota. Jurusan Planologi, Institut Teknologi Indonesia.

65) _____ (1997). Perhitungan Model Basis Ekonomi dalam Analisis Ekonomi Wilayah. Modul Praktis 4- Ekonomi Wilayah dan Kota. Jurusan Planologi, Institut Teknologi Indonesia.

66) _____ (1998). Pengantar Perhitungan Analisis Input-Output dalam Analisis Ekonomi Wilayah. Modul Praktis 5- Ekonomi Wilayah dan Kota. Jurusan Planologi, Institut Teknologi Indonesia.

67) Smith, Christine ed. (1990). *Practical Methods of Regional Science and Empirical Applications*, Selected Papers of Walter Isard Volume 2, MacMillan Academic and Professional Ltd, London, 1990.

68) Solow, Robert, M. (1956). *A Contribution to the Theory of Economic Growth*. Quarterly Journal of Economics 32. February 1956.

69) _____ (1957). *Technical Change and the Aggregate Production Function*. Review of Economics and Statistics 39, August 1957.

70) _____ (1987). *Growth Theory and After*. Nobel Lecture. The Nobel Foundation 1987.

71) Sonis, Michael (2005). *Central Place Theory After Christaller and Losch: Some further explorations*. Paper prepared for 45th Congress of the Regional Science Association, 23-27 August 2005, Vrije Universiteit Amsterdam.

72) Sutami, Prof. Ir. (1976). *Ilmu wilayah (regional science) dalam kaitannya dengan analisa kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan di Indonesia*. Pidato pengukuhan jabatan Guru Besar Ilmu Wilayah di Universitas Indonesia, 20 November 1976.

73) Timmer, Marcell P. (1999). *Indonesia's Ascent On the Technology Ladder: Capital Stock and Total Factor Productivity in Indonesia Manufacturing, 1975-95*. Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 35 No. 1, April 1999. Halaman 75-97.

74) Toyomane, Norimichi (1988). *Multiregional Input-Output Models in Long –Run Simulation*. International Development Center of Japan. Tokyo, Japan. Kluwer Academic Publishers (Distributor). Martinus Nijhoff Publishers. Dordrecht.

75) Uwe Deichmann, Kai Kaiser, Somik V. Lall, Zmarak Shalizi (2005). *Agglomeration, Transport, and Regional Development in Indonesia*. The World Bank, World Bank Policy Research Working Paper 3477, January 2005.

76) Venables, A. (2002). Trade, Location and Development: an Overview of Theory. Paper prepared for "Patterns of Integration in the Global Economy" project, Office of the Chief Economist, Latin America and Carribean region, World Bank, 2002.

77) Weber, Alfred. *Alfred Weber's Theory of Location of Industries*, English Edition with Introduction and notes by Carl Joachim Friedrich-Harvard University, the University of Chicago Press, Chicago, 1929.

78) West, Guy R. (1992). *Input-Output for Practition*. Version 7. University of Queensland, Australia.

79) Wong, Richard Y.C. (1995). *Understanding Rapid Economic Growth: A New Tale of the Four Asian Dragons*. HKCER Letters, Vol. 30, January 1995

80) Yotopoulos, PA dan Jeffrey B. Nugent (1976). *Economics of Development – Empirical Investigations*. Harper and Row Publisher. New York.

81) Young, Alwyn (1993). *Lessons from the East Asian NIEs: A Contrarian View*. NBER Working Paper 4482, October 1993.

82) Yusgiantoro, Purnomo (2000). *Ekonomi Energi- Teori dan Praktik*. LP3ES, Jakarta, Maret 2000.

83) http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Place_Theory

84) http://fr.wikipedia.org/wiki/Modele_christallerien

Publikasi Laporan dan Data Statistik Berkala

1) Asian Development Bank (2005). *Improving the Investment Climate in Indonesia*. Joint Asian Development and World Bank Report. May 2005.

2) Badan Otorita Pengembangan Industri Batam web site.

3) Badan Pusat Statistik (BPS) – (2003). *Tabel Input-Ouput Indonesia 2000, Jilid II (66 sektor)* dan *Jilid III (175 sektor)*; BPS, Jakarta-Indonesia, Desember 2003 .

4) _____ (BPS), (2006). *Berita Resmi Statistik No. 47/ IX/ 1 September 2006*, BPS, Jakarta

5) _____ (BPS)- (2006). *Produk Domestik Regional Bruto Propinsi-Propinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2001- 2005*. Jakarta

6) _____ (BPS)- (2008). **Indeks Pembangunan Manusia 2006-2007**. Jakarta – Indonesia, 2008

7) _____ (BPS)- (1997). *Statistik Indonesia 1996*. Jakarta

8) _____ (BPS)- (2001). *Statistik Indonesia 2000*. Jakarta

9) _____ (BPS)- (2005). *Statistik Indonesia 2004*. Jakarta

10) _____ (BPS)- (2008). *Statistik Indonesia 2007*. Jakarta

11) Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. *Sulawesi Selatan Dalam Angka 2006*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, 2007

12) Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. *Sulawesi Tengah Dalam Angka 2007*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Palu, 2008

13) Departemen Kimpraswil/ PU (2004). *Statistik Jalan 2000*.

14) Energy Information Administration (2002). *International Energy Annual 2002*.

15) Groningen Growth and Development Center (2003). *Total Economy Data Base*, March 2003.

16) International Cocoa Organization (ICCO)- (2006). *Annual Report 2005/2006*.

17) International Coffee Organization (ICO) - (2008). *Statistics 2007/8*

18) Kantor Statistik Propinsi DKI Jakarta, (1996). *Jakarta Dalam Angka - 1996*, Jakarta

19) Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). (2004). *Pemeringkatan Daya Tarik Investasi 214 Kabupaten/Kota di Indonesia, Dalam Persepsi Dunia Usaha Tahun 2004*. KPPOD- USAID- The Asia Foundation, Jakarta, 2004.

20) _____ (2005). *Investment Competitiveness of Regencies/ Cities in Indonesia, 2005 - Perception of Business Community- Rating of 169 Regencies and 59 Cities in Indonesia and Summary Report* . KPPOD- USAID- The Asia Foundation, Jakarta, 2005.

21) PLN. 2005. Statitik PLN 2004.

22) Statistik Energi Indonesia 2002.

23) Transparency International (2004). Corruption Perceptions Index 2004, Berlin, Germany. http://www.transparency.org

24) United Nations Development Programme (UNDP) 2004. *Human Development Report 2004*. New York.

25) United Nation (2003). *World Urbanization Prospect 2003 Revision.* New York.

26) _____ (2007). *Urban Population, Development & the Environment 2007.* Department of Economic and Social Affairs, Population Division, New York. www.unpopulation.org

27) World Bank (2004). *Doing Business in 2004- Understanding Regulation.* Washington DC.

28) World Economic Forum. *The Global Competitiveness Report 2003/2004.* World Economic Forum in collaboration with IESE Business School.

INDEKS

Indeks Nama

Alonso, William 14, 59-64
Arrow, Kenneth J. 216c
Aswicahyono, Haryo 168, 542c
Barro, Robert J. 216c, 218
Basant, Rakeshal 217c, 542c
Baumol, William J. 47c
Bendavid, Avrom 46, 47c
Bergman E.M. 217c, 538, 542c
Bhagwati, Jagdish 173c,
Blakely, Edward J. 148c, 217c, 278-279, 306c
Blinder, Alan S. 47c
Boeke 273
Bradshaw, Ted 148c, 217c
Bramhall, David F. 149c
Cahyat, Ade 306c
Castells, Manuel 276, 277, 306c
Chambers, Robert 2768, 306c
Chenery 445
Christaller 14, 52, 91-102
Dinc, Mustafa 516c
Dixit, Avinash 217c
Dornsbuch, Rudiger 216c
Dunn-Rankin, Peter 148c
Elhanan Helpman 217c
Feser, E.J. 207, 217c, 538, 542c
Fischer, Stanley 216c
Fujita, M. 145, 148c
Gert-Jan Hospers 217c
Giarratani, Frank 22c, 31-35, 47c, 63, 84c, 118, 148c
Glaeser E.L. 216c, 491
Hananto Sigit 169, 169, 216c
Hedi D. Kallal 216c
Heri Muliono 216c
Higgins, Benjamin 216c
Hirschman 263c
Hoover, Edgar M. 8-10, 15, 21c, 28, 29-36, 47c, 63, 84c, 118, 135, 137, 138, 148c204, 217c 235, 534,
Hotelling 120-122
Husted, Steven 263c
Isard, Walter 23, 47c, 128, 145, 148c, 235, 437, 443, 445, 447c, 483, 486, 516c
Isserman, Andrew M. 465, 478, 516c
Jane Jacobs 194, 195, 216c
Jose A. Scheinkman 216c
Kai Kaiser 263c
Krugman, Paul R. 144, 148c, 172, 190, 208-210, 217c, 263c
Core-periphery 144, 190, 211.
Krumme, G. 84c
Leontief, Wassily 395, 404, 405, 408-414, 416, 417, 429, 430, 433, 437, 441, 445
Lipton, Michael 273, 306c
Urban bias 273
Losch 14, 91-102
Malecki, E.J 542c
Marshall, Alfred 15, 138, 143, 184, 190, 204, 205, 208, 540
Melvin, Michael 263c
Moses, Leon N. 148c, 445
Mueller M.G. 216c
Myrdal, Gunnar 266
Cumulative causation 11, 17, 266, 272, 298
Spread effect 11, 17, 183, 266
Backwash effect 11, 17, 183, 266
Nash, Nash equilibrium 144, 148c
Nordhaus, William D. 47c
Nugent, Jeffrey B. 306c
Obafield, Maurice 263c
Oppenheim, Norbert 390c
Perroux 206, 207, 217c, 538
Polenske, Karen 217c
Porter, Michael 144, 145, 535-539, 542c
Model intan Porter (Porter's diamond model) 536
Quesnay, Thomas 179, 316

Reilly 130-131, 150
Romer, Paul M. 191, 216c
Rosenfeld, Stuart A. 542c
Samuelson, Paul A. 47c
Sarel, Michael 173c
Saville, Donald 217c
Schooler, E.W. 148c
Schumpeter 206
Schumpeterian 207, 217c
Sheleifer, Andreis 217c
Solow, Robert, M. 165, 167, 173, 205, 216c, 217c, 221-224
Somik V. Lall 234, 237, 238, 263c
Smith 134-137
Stiglitz, Joseph 217c
Timmer, Marcell P. 216c
Toyomane, Norimichi 446, 447c
Uwe Deichmann 263c
Venables, A. 190
Von Thunen 14, 51, 53- 58, 59, 60, 64, 67, 85-87, 120, 145, 148c,
Walras, Walrasian 179
Weber, Alfred 14, 15, 33, 51, 67-78, 84c
West, Guy R. 447c
Wong, Richard Y.C. 173c
Yotopoulos, PA 306c
Young, Alwyn 171, 176c
Zipf 109

Indeks Subyek

Aglomerasi 9, 14, 15, 33, 68, 76-78, 122, 138, 139, 142, 143, 184, 190, 192, 193, 204, 208, 234, 239, 491, 537
Aksesibilitas dan Prasarana Transport 235-242
Analisis Input- Output 395, 403, 437, 443
Analisis Lokasi Industri Individual berdasarkan Lokasi Sumber Bahan Baku 78-83
Analisis Pengembangan Wilayah 155
Analisis Persyaratan Minimum 459
Analisis Shift-share 491-515
Asal dan Tujuan Pergerakan Barang dan Penumpang 343-349

Barang Publik 242-244
Barang Swasta 242-244

Cumulative causation 11, 17, 267
Ceteris paribus 5

Data kependudukan 315-322, 376, 378
Data Ketenaga-kerjaan 322- 327
Data Potensi Desa (Podes) 350- 353
Daya Dukung Lingkungan 155, 160, 265, 302- 305
Daya dukung lingkungan dan Polusi 302- 305
Daya Kepekaan 432- 436
Daya Penyebaran 204, 432-436
Daya Tarik Lokasi 158-159, 164, 225
Diversifikasi usaha 158, 189, 193- 204

Economic linkages (keterkaitan ekonomi) 158, 177, 218, 212-213, 521
Forward linkages 143, 144, 207, 211, 433, 435, 538
Backward linkages 143, 144, 207, 208, 433, 435
Horizontal linkage 16, 39, 76, 139, 143, 174
Vertical linkage 16, 39, 67, 143, 174, 476
Efek Pengganda (Efek Pengali) 4, 6, 18, 40, 46, 176-182, 369, 373, 404, 411, 412, 416, 420, 422, 424
Efek Pengganda Akibat Perubahan Riil Komponen Permintaan Akhir 424
Efek pengganda output (Faktor Pengali Output) 412-419
Efek Pengganda Pendapatan 420-422
Efek Pengganda Tenaga Kerja 379-377, 422- 423

Efek sebar (spread effect) 11, 17, 183, 266
Efek hisap (backwash effect) 11, 17, 183, 266

Ekonomi Basis 3, 13, 26, 126, 136-141, 145, 150, 288-315, 323, 359, 369, 379, 388, 423, 426,

Ekonomi Kewilayahan 5, 8-18, 26, 29-36, 39-41, 46, 51, 155-157, 176, 179, 189, 210, 230, 265, 291, 314, 339, 344, 350, 353, 390, 453-454, 464, 478, 521-523
Ekonomi wilayah sebagai Proses yang Berkelanjutan 184- 190

Eksternalitas 15, 16, 40, 139, 143, 156, 184, 187-194, 204, 205, 208, 538
Eksternalitas Ekonomi 190-193

Energi sebagai Salah Satu Kebutuhan Dasar 248- 252

Faktor Aksesibilitas 235- 242
Faktor produksi bahan baku dan lahan 174
Faktor Produksi Kapital (modal) 163- 164
Faktor Produksi Teknologi 165- 173
Faktor Produksi Tenaga Kerja 164- 165
Fasilitasi pemerintah 252
Fungsi Produksi 160- 163

Gradien Kepadatan Penduduk perkotaan 66- 67

Hirarki pusat kegiatan 93-102, 103-116
Hukum Gravitasi Ratail Reilly 130-132, 150

Iklim usaha kondusif 252
Ilmu Kewilayahan 6, 23
Increasing return 142, 208-211, 217c
Increasing return to scale 163
Indeks Potensial Akses ke Pasar (IPAP) 132-134
Input antara 174
Input-Output antar wilayah (Inter-regional Input-Output = IRIO) 437
Interaksi antar lokasi 122- 131
Inter Regional I/O (IRIO) 437

Jumlah Prosedur 256

Kecenderungan konsentrasi lokasi usaha/ industri 142- 146
Kecenderungan Mengkonsumsi (propensity to consume) 367
Kekuatan Internal Perekonomian Wilayah 183
Kemiskinan 265, 280, 287
Kependudukan 315, 376, 378
Kesenjangan Ekonomi 241
Kesetimbangan Input – Output 399
Ketenaga-kerjaan 322
Keterkaitan ekonomi 38
Keterkaitan ke depan 144
Keterkaitan ke belakang 144
Keterkaitan ekonomi antar wilayah 212
Ketersediaan Lahan 234
Ketidak merataan pembangunan 18, 280- 290, 291-302
Keunggulan Komparatif 229
Keunggulan Komparatif Sumberdaya Alamiah Lokal 230
Keunggulan Kompetitif 158, 496, 537, 540
Kewirausahaan – entrepreneurships 205- 207
Kluster Ekonomi 38, 537-541
Koefisien Gini 299, 301, 356-360
koefisien lokalisasi 479- 486
koefisien spesialisasi 479- 491
Konsentrasi Lokasi Kegiatan 190-193
Konsep kemiskinan 280
Konsep Penentuan Lokasi Industri 91, 134-139
Konsepsi dan Permodelan 36
Konvergensi usaha 193- 204
Kurva lokalisasi 479-486
Kurva spesialisasi 479- 491
Kurva Lorenz 357, 358, 484, 486
Kutub Pertumbuhan (growth pole) 205-207, 217c, 538

Location Quotient (LQ) 456, 463-479
Lokasi Industri berorientasi bahan baku 80- 90

Menghitung Invers Matriks Leontief [I – A] 408
Menghitung Matriks Leontief [I – A] 408
Millenium Development Goals (MDGs) 287
Model Analisis Input-Output 395
Model cincin von Thunen 83
Model dispersive 138-139
Model Ekonomi Basis 361, 373, 383

Model Ekonomi Basis Banyak-Sektor 383
Model Kohesif 138-139
Model Lokasi Kegiatan Pertanian Von Thunen 53- 59
Model pengganda kependudukan 378
Model pengganda tenaga kerja 376- 377
Model kompetisi spasial Hotelling 120-122
Model-model pengukuran kemiskinan di Indonesia 280-286
Multi-Regional Input-Output (MRIO) 443- 445

Pareto optimum 291, 522
Pemerataan 17, 23, 40, 160, 204, 265, 267, 270, 273, 291, 294, 298, 299, 301, 214, 324, 358
Pendekatan Biaya Lokasi Terkecil- Weber 67- 83
Pendekatan Ekonomi Basis 479
Pendekatan Luasan Pasar (Market Area) 116- 120
Pengembangan Ekonomi Lokal 17, 159, 265, 278, 279
Pengganda Basis Prof. Tiebout 369-373
Pengganda Kependudukan 378-383
Pengembangan karakter perekonomian perkotaan 276-277
Pengukuran tingkat ketidak- merataan 299- 302
Perekonomian Perkotaan 266, 276, 277, 278
Perhitungan Analisis Input-Output 403-411
Perhitungan Matriks Koefisien Langsung Perdagangan [A] 406-408
Perspektif Perencanaan 279, 522-523
Pola pengembangan pita (ribbon development) 241, 246
Propensity to consume 367
Proses Aglomerasi 190- 193

Ranking KPPOD 256- 259
Rapid Rural Appraisal 276

Sinergi perencanaan sistem transportasi 244- 248
Skala Ekonomis 208- 211
Struktur Produk Domestik Wilayah 327- 339
Struktur Tabel Input-Output 397-403
Sumberdaya Alam sebagai Bahan Baku 230- 234
Sunrise 282, 284

Tabel Transaksi Perdagangan 395-400, 405, 406, 436, 443
Tabel Transaksi Perdagangan Antar Sektor 339-342
Tata Guna Lahan di Perkotaan 59-64
Teknik Asumsi 456- 459
Tenaga Kerja Murah 73, 140, 227, 229, 2384
Teori Lokasi Industri 14, 67
Teori Sewa Lahan von Thunen 53-59
Teori Tempat Sentral (Central Places) Christaller dan Losch 91-102
Tingkat Korupsi 256-257
Total Factor Production 221-224
Transaksi Perdagangan Antar Wilayah 212, 215, 342-344

Urban Bias 273, 307c,

Zero sum game 298, 522,